

2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

Jalan Kenari No. 14 A, Yogyakarta, Kode Pos – 55166

Telp. : (0274) 555836; Fax : (0274) 554206

Surel : bpbd@jogjaprov.go.id

Laman : bpbd.jogjaprov.go.id



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 5 Februari 2026

Kepala Pelaksana BPBD

AGUSTINUS RURUH HARYATA
S.H., S.T., M.Kes.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana” :

- Diukur dengan indikator Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY. (Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83. 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93. 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81. 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95. 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70. 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75. 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66. Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik. 2) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. 3) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. 4) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. 5) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Perhitungan Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut:
$$= ((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / \text{IKD} \times 100\% = (3,87/ 5) / 0,76 \times 100\% = 0,77 / 0,76 \times 100\% = 101,32\%$$
 (Perhitungan menggunakan 5 skor prioritas dikarenakan Skor 1 dan 2 dianggap sudah maksimal sehingga yang dijadikan prioritas perhitungan 5 skor dibawahnya).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY;

- Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 101,3%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 101,32%. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,02%;
2. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana”:

- Diukur dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY (Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5.

Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5 \\
 &= 3,87/ 5 \\
 &= 0,77
 \end{aligned}$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penanggulangan Bencana, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0,76 (Nilai); sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 0,77 (Nilai). Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101.32%.
 - Dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 0,71, capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 0,77 mengalami kenaikan sebesar 0,06.
3. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Meta Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n, Penjelasan detail dari Meta

Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1) Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah dan 2) Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 87,26 (indeks); sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 89,96 (indeks). Dengan demikian capaian ini telah tercapai melebihi target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 103,09%.
- Dibandingkan dengan capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 87,16 (indeks), capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 89,96 (indeks) mengalami kenaikan sebesar 2,8 (indeks).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Renstra BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 selain berpedoman pada RPD DIY, juga mempedomani dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang. Selain itu, dokumen Renstra BPBD DIY 2022-2027 didasari pada KLHS(Kajian Lingkungan Hidup Strategis) DIY untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kejadian bencana alam di Indonesia yang terulang baik jenis yang sama maupun berbeda mendorong semakin pentingnya peran pengurangan resiko bencana. SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030, yang disepakati dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Dunia di Kobe pada tahun 2005, mengamanatkan perencanaan tata ruang sebagai salah satu alat

untuk pengurangan resiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalam pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkan dalam praktik perencanaan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Pengurangan risiko bencana umumnya dilakukan secara struktural yaitu membangun fisik misalnya tanggul sungai, namun dapat juga dilakukan dengan cara lain, salah satunya dengan peningkatan ketahanan komunitas (community resilience) masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengadopsi perencanaan tata ruang khususnya isi pola ruang;

3. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di setiap wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kondisi eksisting penggunaan lahan saat ini banyak bertampalan dengan wilayah rawan bencana. Oleh karena itu perlu suatu kegiatan untuk mengintegrasikan antara RTRW dengan kondisi bencana di Indonesia. Struktur ruang khususnya jaringan jalan dapat memberikan akses ke wilayah terdampak longsor maupun banjir dengan baik sehingga evakuasi mudah dilaksanakan. Integrasi diperlukan untuk mengimplementasikan pola ruang maupun struktur ruang selanjutnya yang diperlukan untuk kajian rekayasa penanggulangan wilayah rawan bencana dengan cara struktural berupa bangunan fisik, maupun peningkatan kapasitas masyarakat dan pemasangan instrumen peringatan dini yang akan dipasang pada wilayah rawan bencana. Alokasi pola ruang khususnya pada penggunaan lahan yang rawan terdampak bencana perlu ditinjau kembali atau dibuat infrastruktur untuk mengurangi dampak;

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	1
Daftar Isi	5
BAB I Pendahuluan	8
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	10
1.3. Isu-Isu Strategis	11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	11
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024	15
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	20
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	20
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	23
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	28
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB III Akuntabilitas Kinerja	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	32
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	75
3.3. Efisiensi Anggaran	93
3.4. Inovasi	94
3.5. Lintas Sektor	96
BAB IV Penutup	98
4.1. Kesimpulan	98
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	99
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	12
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana	12
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025	14
Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	15
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2022-2027	21
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	22
Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	24
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025	28
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025	29
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025	30
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	37
Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	62
Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025	63
Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	65
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	67
Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1	47
Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	61
Tabel III. 10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	68
Tabel III. 11 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPBD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	89
Tabel III. 12 Kontribusi Program BPBD DIY Setda DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah	91
Tabel III. 13 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025	93
Tabel III. 14 Inventarisasi Lintas Sektor BPBD DIY	97

Daftar Gambar

Gambar I.1	Cascading Kinerja	9
Gambar I.2	Struktur Organisasi	10
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	31
Gambar II.2.	Co Reforms Space	31
Gambar III.1	Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026	53
Gambar III.2	Rencana kontigensi Renkon Gunung Merapi, Renkon Banjir, Gempa Bumi, Siklon Tropis	53
Gambar III.3	Rencana Kontigensi Fasilitas Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	55
Gambar III.4	KAJI CEPAT BENCANA	56
Gambar III.5	PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA	56
Gambar III.6	PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA	57
Gambar III.7	Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Longsor Dan Banjir	57
Gambar III.8	Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Longsor Dan Banjir	57
Gambar III.9	Rapat Koordinasi Damkarmat Kabupaten/ Kota Se-DIY	58
Gambar III.10	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Dan MKKG	58
Gambar III.11	Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) bagi Abdi Dalem Karaton Yogyakarta	59

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

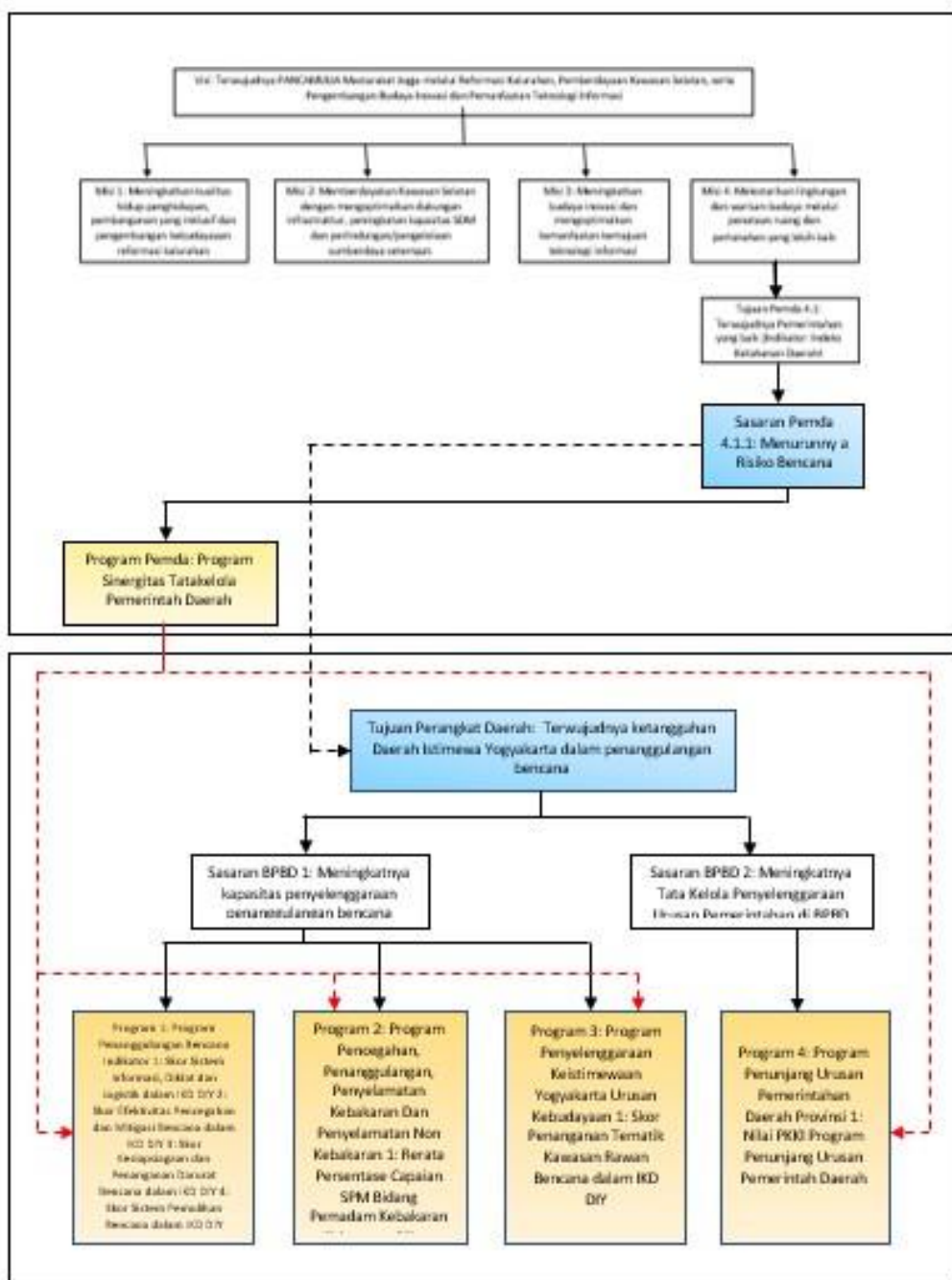
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

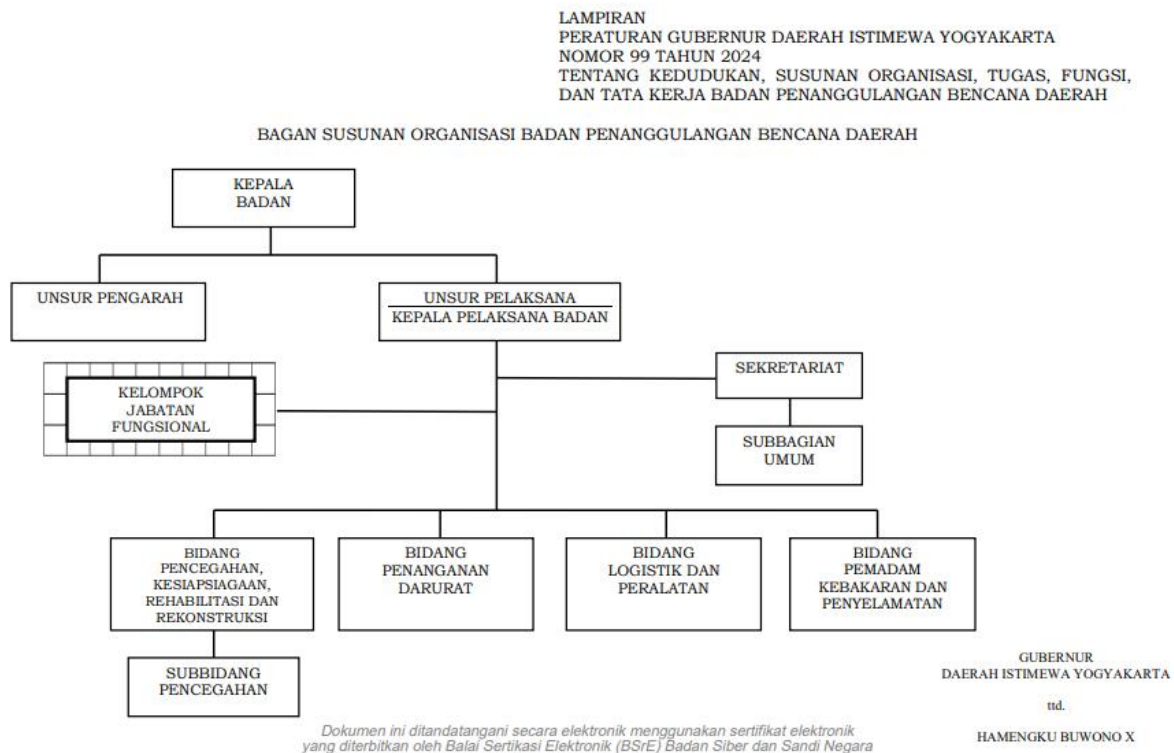
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja Penyelarasan



Sumber: RPJMD 2022-2027, Renstra BPBD DIY 2022-2027

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran PERGUB DIY NOMOR 99 TAHUN 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024, BPBD DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsi BPBD DIY sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja Badan;
- Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;

- Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- Pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- Penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- Pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat;
- Pelaksanaan Pusat Pengendalian Operasi Kebencanaan;
- Pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- Penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
- Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;.
- Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

1.3. Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis
1	Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2	Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektorsektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3	Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4	Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.

Sumber: BPBD DIY (2024)

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5					4	3	1				3	1
	2. Pengawas	2					2	2					1	1
	3. Pelaksana	24					97	2	42	10	41	1	73	24
C.	Jabatan Fungsional	12					12	10	2	1			6	6
	Jumlah	44					116	18	45	11	41	1		

Sumber: Data Kepegawaian BPBD DIY Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 18 orang (15,5%) , disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 45 orang (38,7%), D3 11 orang (9,5%), SLTA 41 orang (35,4%) SMP 1 orang (0,9%). Berdasarkan data kepegawaian, dari total 43 pegawai, (Tidak terdapat pegawai penyandang disabilitas). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit, kesetaraan gender, dan inklusi sosial dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1.	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		0,00
	Persediaan		3.678.465.794,02
	JUMLAH ASET LANCAR		3.678.465.794,02
2.	ASET TETAP		
	Tanah	1	2.975.357.000,00
	Peralatan dan Mesin	2.030	31.434.345.389,07
	- Alat besar	105	

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	- Alat angkutan - Alat bengkel dan alat ukur - Alat pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio, komunikasi dan pemancar - Alat kedokteran dan kesehatan - Alat laboratorium - Alat persenjataan - Komputer - Alat eksplorasi - Alat produksi, pengolahan dan pemurnian - Alat keselamatan kerja - Peralatan proses/produksi - Rambu - rambu - Peralatan olahraga	60 56 58 746 297 111 48 168 211 1 2 68 88 9 2 11	
	Gedung dan Bangunan	11	9.154.961.350,00
	- Bangunan Gedung - Tugu Titik Kontrol/Pasti	8 3	
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17	6.792.186.700,00
	- Jalan dan Jembatan - Bangunan Air - Instalasi - Jaringan	2 3 5 7	
	Aset Tetap Lainnya	223	419.145.000,00
	- Bahan Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga - Aset Tetap dalam Renovasi	221 1 1	
	Akumulasi Penyusutan		(33.935.578.080,45)
	JUMLAH ASET TETAP		16.840.417.358,62
3.	ASET LAINNYA		
	Aset Tidak Berwujud	5	394.500.000,00
	Aset Lain-lain	2	332.430.000,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(40.000.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA		686.930.000,00
	JUMLAH ASET		21.205.813.152,64

Sumber: Data Neraca BPBD DIY 31 Desember 2025 (unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Berdasarkan Tabel I.2, total aset BPBD DIY per 31 Desember 2025 (unaudited) sebesar Rp21.205.813.152,64 yang terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar sebesar Rp3.678.465.794,02 seluruhnya berupa persediaan. Aset tetap memiliki nilai bersih Rp16.840.417.358,62 setelah dikurangi akumulasi penyusutan, dengan komposisi utama berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Aset lainnya tercatat sebesar Rp686.930.000,00. Komposisi aset tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana BPBD DIY didominasi oleh aset tetap yang mendukung kegiatan operasional.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0	Rp0	Rp0
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH	Rp20.622.803.924,00	Rp18.982.338.665,00	Rp1.640.465.259,00
5 1	BELANJA OPERASI	Rp20.597.203.924,00	Rp18.903.838.665,00	Rp1.693.365.259,00
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp14.837.988.624,00	Rp13.656.467.505,00	Rp1.181.521.119,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.759.215.300,00	Rp5.247.371.160,00	Rp511.844.140,00
5 1 05	Belanja Hibah	Rp0	Rp0	Rp0
5 5 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0	Rp0	Rp0
5 2	BELANJA MODAL	Rp25.600.000,00	Rp78.500.000,00	Rp52.900.000,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp25.600.000,00	Rp8.500.000,00	Rp17.100.000,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	Rp0	Rp0
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
	Jumlah Belanja	Rp25.600.000,00	Rp78.500.000,00	Rp52.900.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	Rp20.622.803.924,00	Rp18.982.338.665,00	Rp1.640.465.259,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY semula Rp20.622.803.924,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp18.982.338.665,00 atau berkurang Rp1.640.465.259,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari kebijakan *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	a) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal guna memastikan bahwa Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.	Monitoring Manajemen Kinerja : - Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memperhatikan: - Identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU): Tentukan IKU yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD DIY, misalnya: jumlah kejadian bencana yang ditangani, jumlah korban yang diselamatkan, efektivitas penyaluran bantuan, dll. - Pengumpulan Data: Lakukan pengumpulan data secara rutin dan akurat terkait pencapaian IKU. - Analisis Data: Analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan potensi perbaikan. - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP):

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		▪ Evaluasi Sistematis: Lakukan evaluasi AKIP secara sistematis dan terstruktur, melibatkan tim internal yang kompeten. ▪ Identifikasi Permasalahan: Identifikasi permasalahan yang ditemukan selama evaluasi, misalnya: hambatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya, dll. • Pemberian Nilai dan Atribut: Berikan nilai dan atribut yang relevan terhadap kinerja BPBD DIY berdasarkan hasil evaluasi. • Pemberian Solusi: Tawarkan solusi atas permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.
	b) Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi dengan melakukan peningkatan dan evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada pencapaian kinerja, Pelaporan Kinerja dalam penyajian laporan kinerja yang menjadi tanggungjawab seluruh pegawai dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;	Tindak lanjut yang dilakukan dengan memperhatikan : • Manajemen Kinerja yang Baik dan Terdokumentasi: Penting untuk mengelola kinerja secara sistematis dan terstruktur, dengan dokumentasi yang memadai. • Peningkatan dan Evaluasi Pengukuran Kinerja: Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap cara pengukuran kinerja, memastikan relevansi dan akurasi indikator kinerja. • Pelaporan Kinerja: Menyajikan laporan kinerja yang akurat dan transparan, serta memastikan semua pegawai bertanggung jawab atas penyajian laporan tersebut. • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti. • Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		Kinerja: Tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh pegawai, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. • Mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DI Yogyakarta: Seluruh kegiatan manajemen kinerja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DI Yogyakarta. -
	c) Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY	Untuk meningkatkan praktik baik budaya kinerja dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), langkah-langkah yang diambil: 1. Peningkatan Keterlibatan <i>Stakeholder</i> • Kolaborasi yang lebih erat: Libatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Masyarakat, pejabat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memperbaiki sistem akuntabilitas. • Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat: Peningkatan keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan dan menjelaskan pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat melalui forum publik, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. 2. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi • Peningkatan kapasitas pengawas: Pemerintah daerah dapat melibatkan lebih banyak lembaga pengawasan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja. • Meningkatkan transparansi data kinerja:

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		Membuka lebih banyak informasi terkait kinerja anggaran dan program. 3. Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja yang Jelas • Indikator kinerja yang terukur: Menyusun indikator yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan daerah serta memantau pencapaiannya secara berkala. • Sistem manajemen kinerja berbasis data: Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan kinerja secara real-time akan meningkatkan akuntabilitas. 4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah • Pelatihan dan pengembangan profesional: Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu ada pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait manajemen kinerja dan akuntabilitas. • Penghargaan bagi kinerja baik: Memberikan penghargaan kepada unit kerja atau pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik dapat mendorong budaya kerja yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. 5. Mendorong Inovasi dan Kreativitas • Adopsi teknologi dan inovasi: Pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Sistem aplikasi yang efisien dan sistem informasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		• Mendorong budaya inovatif: Memberikan ruang bagi pegawai untuk memberikan ide-ide baru yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Inovasi dapat berupa kebijakan, sistem, atau prosedur yang lebih efisien dan transparan. 6. Evaluasi dan Umpan Balik Berkala • Audit kinerja secara rutin: Lakukan audit kinerja secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah. Temuan dari audit ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem akuntabilitas. • Sistem umpan balik yang efektif: Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah daerah melalui platform yang mudah diakses, seperti aplikasi atau website resmi. 7. Konsistensi dalam Penegakan Aturan - Penegakan disiplin dan sanksi yang adil: Menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang tidak memenuhi standar kinerja akan membantu meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap tindakan pemerintah daerah.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana”.

Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana”

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY 2022-2027

N O.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal (Base line 2022)	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Periode*/Rencana
					2023	2024	2025*	2026*	2027*	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4
A.	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Persen	93,7	100	101,4	101,3*	101,3*	101,2*	101,2*
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,59	0,65	0,71	0,76*	0,81*	0,86*	0,86*
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	BB (> 70-80)	A (85,85)	A (87,16)	A (87,26)*	A (88,50,)*	A (90)*	A (90)*

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana di masyarakat	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	1. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana 2. Meningkatkan pengelolaan risiko dan perencanaan terpadu 3. Mengembangkan Sistem Informasi, Diklat, dan logistik 4. Menangani tematik kawasan rawan bencana 5. Meningkatkan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	1. Penguatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana 2. Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penguatan Kebijakan Daerah tentang RPB 4. Penyediaan Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah 5. Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya 6. Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.
		1. Memperkuat Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 2. Mengembangkan Sistem Pemulihan Bencana	1. Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis 2. Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional 3. Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB 4. Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan 5. Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 6. Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 7. Penyimpanan/pegudangan Logistik PB 8. Sekolah dan Madrasah Aman

			Bencana 9. Rumah Sakit Aman Bencana 10. Desa Tangguh Bencana 11. Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami 12. Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi 13. Penentuan Status Tanggap Darurat 14. Penerapan sistem komando operasi darurat 15. Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana 16. Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban 17. Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah. 18. Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah. 19. Perbaikan rumah penduduk dengan lebih baik (<i>build back better</i>) dapat dijalankan secara swadaya 20. Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan.
--	--	--	--

Sumber : Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2022-2027

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp17.223.543.674,00	Rp15.956.282.555,00	(Rp1.267.261.119,00)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp20.451.100,00	Rp18.051.100,00	(Rp2.400.000,00)
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp7.100.000,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.851.100,00	Rp5.451.100,00	(Rp2.400.000,00)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.862.434.624,00	Rp13.680.913.505,00	(Rp1.181.521.119,00)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.837.988.624,00	Rp13.656.467.505,00	(Rp1.181.521.119,00)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp8.578.000,00	Rp8.578.000,00	Rp0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp4.050.000,00	Rp4.050.000,00	Rp0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp11.818.000,00	Rp11.818.000,00	Rp0,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp17.400.000,00	Rp14.700.000,00	(Rp2.700.000,00)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp17.400.000,00	Rp14.700.000,00	(Rp2.700.000,00)

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp204.244.200,00	Rp123.604.200,00	(Rp80.640.000,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp164.011.000,00	Rp83.371.000,00	(Rp80.640.000,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.800.064.500,00	Rp1.800.064.500,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp753.496.500,00	Rp753.496.500,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.046.568.000,00	Rp1.046.568.000,00	Rp0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp318.949.250,00	Rp318.949.250,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp27.497.000,00	Rp27.497.000,00	Rp0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp184.553.450,00	Rp184.553.450,00	Rp0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp85.490.800,00	Rp85.490.800,00	Rp0,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp21.408.000,00	Rp21.408.000,00	Rp0,00
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp2.647.017.250,00	Rp2.518.867.410,00	Rp128.149.840,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Rp247.968.890,00	Rp220.835.050,00	Rp27.133.840,00
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Rp247.968.890,00	Rp220.835.050,00	Rp27.133.840,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp1.588.490.950,00	Rp1.541.470.950,00	Rp47.020.000,00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp290.701.200,00	Rp285.881.200,00	Rp4.820.000,00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Rp497.654.750,00	Rp458.654.750,00	Rp39.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp800.135.000,00	Rp796.935.000,00	Rp3.200.000,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp706.234.450,00	Rp656.278.450,00	Rp49.956.000,00
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Rp192.440.450,00	Rp152.440.450,00	Rp40.000.000,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp513.794.000,00	Rp503.838.000,0	Rp9.956.000,00
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp104.322.960,00	Rp100.282.960,00	Rp4.040.000,00
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Rp104.322.960,00	Rp100.282.960,00	Rp4.040.000,00

		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp52.243.000,00	Rp37.743.000,00	Rp14.500.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp52.243.000,00	Rp37.743.000,00	Rp14.500.000,00
		Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp52.243.000,00	Rp37.743.000,00	Rp14.500.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp700.000.000,00	Rp469.445.700,00	Rp230.554.300,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Rp700.000.000,00	Rp469.445.700,00	Rp230.554.300,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp700.000.000,00	Rp469.445.700,00	Rp230.554.300,00
		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Rp700.000.000,00	Rp469.445.700,00	Rp230.554.300,00
		Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Rp700.000.000,00	Rp469.445.700,00	Rp230.554.300,00
		Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	20.597.203.924,00	18.982.338.665,00	25.600.000,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran BPBD DIY Tahun 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah di DIY	Persen	101,3	Triwulan I	101,3
					Triwulan II	101,3
					Triwulan III	101,3
					Triwulan IV	101,3*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,76	Triwulan I	0,76
					Triwulan II	0,76
					Triwulan III	0,76
					Triwulan IV	0,76*
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A (87,16)	Triwulan I	A (87,16)
					Triwulan II	A (87,16)
					Triwulan III	A (87,16)
					Triwulan IV	A (87,16)*

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 15.956.282.555,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp 2.518.867.140,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (APBD)	Rp 37.743.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 545.170.200,00
	Jumlah Anggaran	Rp 19.058.063.165,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Persen	101,3	Triwulan I	101,3
					Triwulan II	101,3
					Triwulan III	101,3
					Triwulan IV	101,3**

Keterangan:

* Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

**Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Sasaran Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	angka	0,76	Triwulan I	0,76
					Triwulan II	0,76
					Triwulan III	0,76
					Triwulan IV	0,76**
22	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	indeks	A (87,26)	Triwulan I	A (87,26)
					Triwulan II	A (87,26)
					Triwulan III	A (87,26)
					Triwulan IV	A (87,26)**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

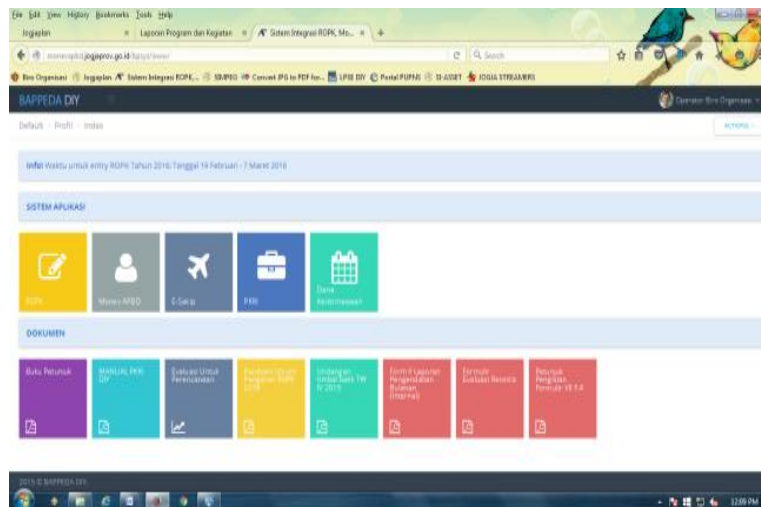
No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 15.956.282.555,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp 2.518.867.140,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 37.743.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 469.445.700,00
	Jumlah Anggaran	Rp 18.982.338.665,00

2. *Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja
3. ** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

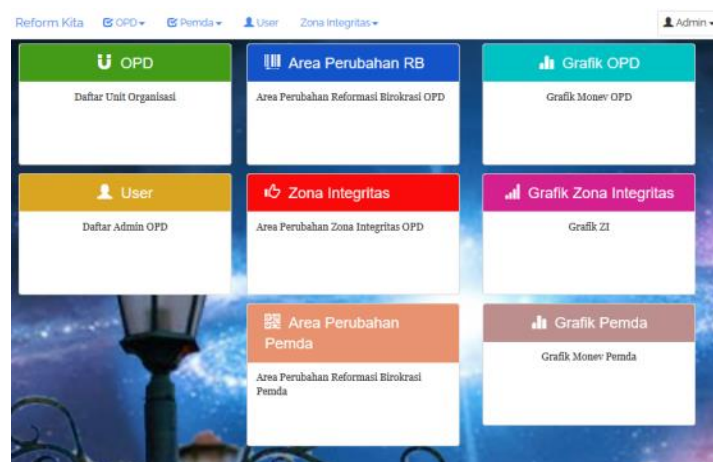
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi Co reforms space yang mengintegrasikan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Gambar II.2. Co Reforms Space



Sumber: https://biroorganisasi.jogjaprov.go.id/coreformspace/menu.php/

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

N O	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATU AN	BAS E LINE 2022	REAL ISASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET*	REALI SASI	PERSE N TASE	KRIT ERIA / KOD E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	<u>Indikator:</u> Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY <u>Meta Indikator:</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% <u>Penjelasan detail dari</u>	Persen	93,7	100	101,3 *	101,3 2	100,02 %	Sa ng at Bai k	101,2

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATU AN	BAS E LINE 2022	REAL ISASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET*	REALI SASI	PERSE N TASE	KRIT ERIA / KOD E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Meta Indikator:</u> Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.0 1.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
						TARGET*	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Perhitungan Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: $= ((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / IKD \times 100\% = (3,87/ 5) / 0,76 \times 100\% = 0,77 / 0,76 \times 100\% = 101,3\%$								
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	<u>Indikator:</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY <u>Meta Indikator:</u> (Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5 <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS	angka	0,59	0,65	0,76*	0,77	101,32 %	Sangat Baik	0,86

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATU AN	BAS E LINE 2022	REAL ISASI 2024	TAHUN 2025				TARGE T AKHIR RPJMD/ RENST RA
						TAR GET*	REALI SASI	PERSE N TASE	KRIT ERIA / KOD E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi,								

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR/ PENJELASAN META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	REALISASI 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
						TARGET*	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: $= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/5$ $= 3,87/5$ $= 0,77$								
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	<u>Indikator:</u> Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan: 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.	indeks	BB	A (87,16)	A (87,26)*	A (89,96)	103,09 %	Sangat Baik	A (90)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Tujuan Perangkat Darah

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%	Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Perhitungan Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: $= ((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / \text{IKD} \times 100\% = (3,87/ 5) / 0,76 \times 100\%$

Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4
			= 0,77 / 0,76 x 100% = 101,32 %

Sumber Data diolah dari sengguh.jogjaprovo.go.id

Kinerja Tujuan Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Indikator Tujuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY <u>Meta Indikator</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-	101,4	101,3	101,32 (Perhitungan Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: = ((0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5) / IKD x 100% = (3,87/ 5) / 0,76 x 100% = 0,77 / 0,76 x 100% = 101,32 %	100,02 %	101,2	100,12%

005/BNPB/PE RB/SS.01.02/ 1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93 3. Pengembang an Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembang						
--	--	--	--	--	--	--

an Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan an Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan an Sistem Pemulihan Bencana						
--	--	--	--	--	--	--

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Tujuan : Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 101,3%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,32% (melebihi target).
- b. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 sebesar 101,2%.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja :

- a. Adanya kebijakan dan aturan daerah yang mendukung ketahanan daerah
- b. Koordinasi dan kerja sama antar instansi yang berjalan baik
- c. Perencanaan yang disusun berdasarkan data dan kondisi di lapangan
- d. Dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan
- e. Kapasitas dan kompetensi aparatur yang cukup
- f. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat
- g. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait
- h. Ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi pendukung

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :

- a. Keterbatasan kapasitas organisasi dalam manajemen bencana.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana masih rendah.
- c. Keterbatasan peralatan tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan fasilitas evakuasi.
- d. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi pascabencana.

Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
1	Regulasi, kelembagaan, dan perencanaan	Masih perlu penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/kelembagaan mekanisme, penguatan kelembagaan dan penguatan kebijakan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.	Penerbitan peraturan, pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta kerjasama kemitraan tertunda	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak terkait pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.
2	Sistem informasi dan peringatan bencana	Belum tersusun dengan baik pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiap-siagaan berkoordinasi dengan pusat data, informasi dan humas.	Informasi kebencanaan dan sistem mitigasi kebencanaan belum terstruktur dengan baik	Menyiapkan petugas dan instruktur cadangan apabila pada saat bersamaan terjadi bencana yang harus direspon.
3	Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana	Perlu peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada kerentanan, keterpaparan, kapasitas bahaya dan lingkungan.	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan aman bencana (SPAB) melalui team peneliti melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan guru serta pihak sekolah.
4	Upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana	Masih diperlukan penataan kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur.	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan yang terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana, salah satunya melalui kerjasama lintas sektor di DIY.

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
5	Upaya kesiap-siagaan daerah untuk penanggulangan bencana	Perlu peningkatan investasi PRB untuk katangguhan/resilensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.	Investasi PRB baik publik maupun swasta terkait penanggulangan dan kesiap-siagaan bencana masih rendah	Integrasi PRB ke dalam kurikulum pendidikan formal.

Capaian indikator tujuan tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Sasaran Strategis, yakni Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY.

1.1.2. Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Kinerja sasaran **Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	(Skor Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik + Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana + Skor Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana + Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana + Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dibagi 5	Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan
1	2	3	4	5
				5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 Formulasi Perhitungan: Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut: $= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/5$ $= 3,87/5$ $= 0,77$

Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0,93
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66

Formulasi Perhitungan:

Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100%

5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut:

$$= (0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5$$

$$= 3,87/ 5$$

$$= 0,77$$

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY <u>Meta Indikator :</u> Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dilaksanakan pada akhir Tahun-n (Akhir Tahun 2025). Berdasarkan Surat dari BNPB Nomor B-005/BNPB/PERB/SS.01.02/1/2026 Perihal Nilai IKD 2025 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil perhitungan nilai IKD DIY Tahun 2025 sebesar 0,76	(0,71)	(0,76)*	(0,77) (Perhitungan Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY pada Tahun 2025 sebagai berikut:	101,32% (0,77 / 0,76 x100%)	A (0,86)*	89,53% (0,77 / 0,86 x 100%)

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
dengan rincian sebagai berikut: 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan : 0,83 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu : 0.93 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik : 0,81 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : 0,95 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana : 0,70 6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana : 0,75 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : 0,66 <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dibagi angka Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dikali 100% 5 Prioritas dalam IKD yang dimaksud sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik 2. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 3. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 4. Perkuatan Kesiapsiagaan dan			$=$ $(0,81+0,95+0,70+0,75+0,66)/ 5$ $= 3,87/ 5$ $= 0,77)$			

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Penanganan Darurat Bencana 5. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana						

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- Target tahun 2025 (0,76) realisasi (0,77), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar (101.32%) (terlampaui);
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar (0,71), terdapat kenaikan sebesar (0,06);
- Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 (0,86).

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penanggulangan Bencana		Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,77	0,81	105,19%
		Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,70	100%
		Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,75	0,75	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
		Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,77	0,66	85,7%
		Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,82	0,95	115,85%
	1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan (Indikator SIPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1. Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Indikator SIPD)	31 Orang	31 Orang	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	1. Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SIPD) : 25 Unit dari 25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Indikator SIPD)	746 Orang	746 Orang	100%
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana (Indikator SIPD)	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	1. Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun (Indikator SIPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Indikator SIPD)	1 Laporan	1 Laporan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		2. Peningkatan Kapasitas Abdi Dalem per Sektor di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat	0 Dokumen	0 Dokumen	

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
		3. Penyelenggaraan Sidang International Organization for Standardization Technical Committee 292	0 Dokumen	0 Dokumen	
		4. Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa Bumi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5. Pelatihan Teknis Penanganan Kebakaran Abdi Dalem MKKG Kraton	400 Orang	400 Orang	100%
		6. Pelatihan dan Simulasi PB Kawasan Sumbu Filosofi di Daerah Istimewa Yogyakarta	0 Lokasi	0 Lokasi	
		7. Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		8. Persiapan Pembangunan Wahana Edukasi Gempa Bumi	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

- a. Capaian Program 3 terdiri dari 1. Program Penanggulangan Bencana, 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, 3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

2. Capaian Program Penanggulangan Bencana

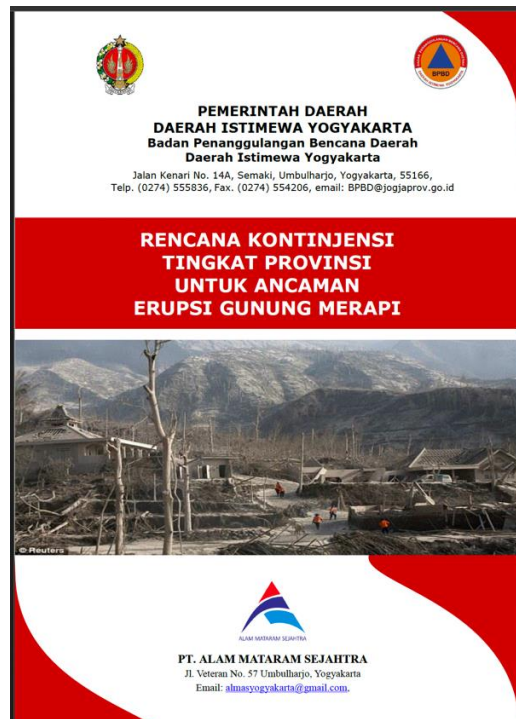
a. Gambar III.1 Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022-2026



Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 merupakan dokumen kajian yang berisi analisis tingkat risiko bencana di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 adalah dokumen yang memuat hasil analisis potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan, kapasitas daerah, serta tingkat risiko bencana pada suatu wilayah dalam periode tahun 2022 sampai dengan 2026 yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

b. Gambar III.2 Rencana kontinjensi Renkon Gunung Merapi, Renkon Banjir, Gempa Bumi, Siklon Tropis

• Renkon Erupsi Gunung Merapi



• Renkon Banjir



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 139 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KONTINGJENSI TINGKAT PROVINSI
 UNTUK ANCAMAN BANJIR
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;

b. bahwa banjir merupakan salah satu potensi ancaman bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sulit diprediksi dengan perioditas yang tidak menentu, sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana banjir diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Gempa Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Kenari No. 14A, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55156

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
 KONTINGJENSI BANJIR TINGKAT PROVINSI DIY
 PADA PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA



LAPORAN AKHIR



PT. SAKALIKE Anvaya Sumapala
 KONSULTANSI PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 Perum. Pondok Permai Gunung No. 41/08
 Jl. Widyadarmas Perumahan, Gendit, Widyadarmas, Bantul
 Telp. (0274) 4337464, 0879 3090 3100
 Email: saktalike@yahoo.com, id.saktalike@gmail.com

• Renkon Gempa Bumi



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 140 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KONTINGJENSI TINGKAT PROVINSI
 UNTUK ANCAMAN GEMPA BUMI
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;

b. bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan gempa bumi dan termasuk daerah kegempaan dengan Intensitas Skala *Modified Mercalli Intensity* (MMI) V – VI, sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana gempa bumi diperlukan pengaturan rencana kontinjensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Tingkat Provinsi untuk Ancaman Gempa Bumi;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Kenari No. 14A, Miliran, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55156
 (0274) 555 836

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KONTINGJENSI
 GEMPA BUMI TINGKAT PROVINSI DIY
 PADA PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

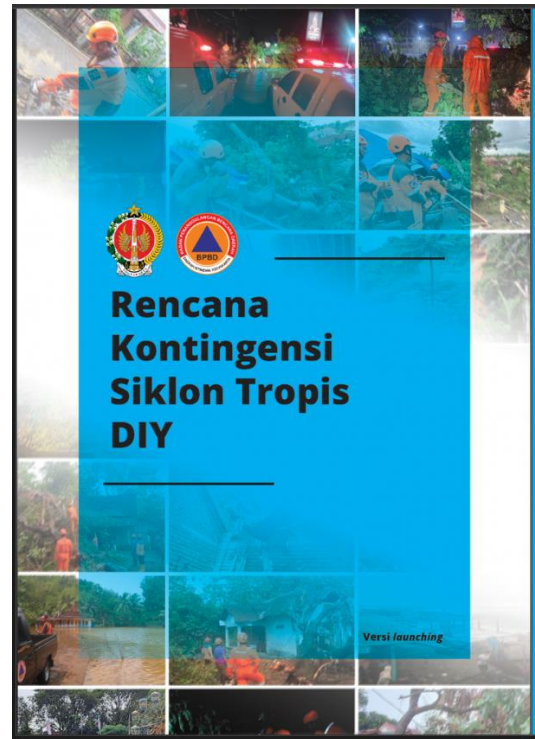
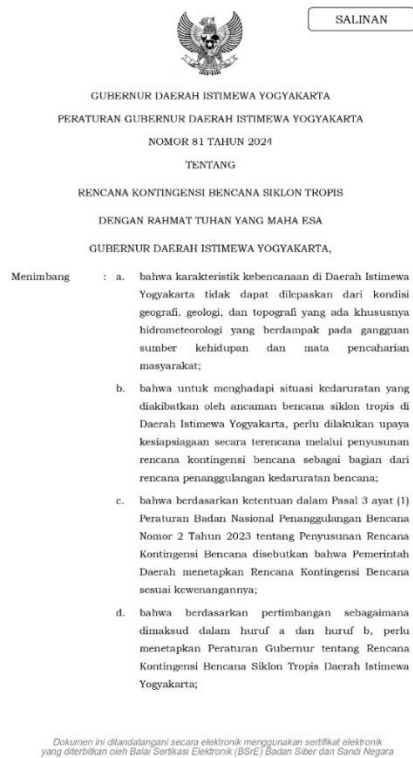






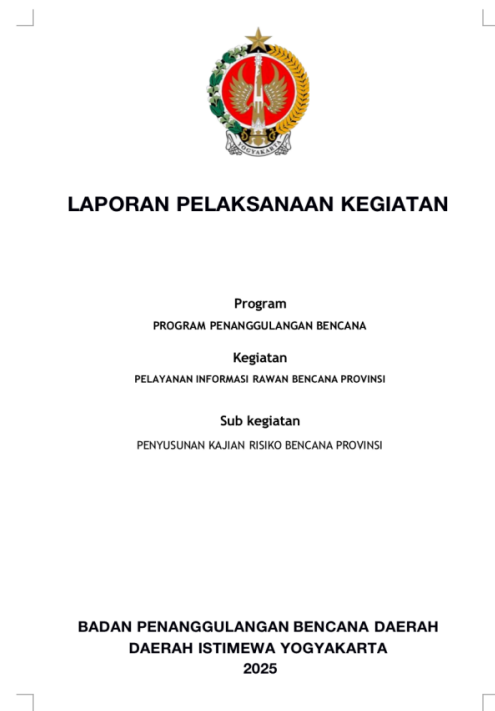

TAHUN ANGGARAN 2021

- **Renkon Siklon Tropis**



c. **Gambar III.3 Rencana kontingensi**

- **Fasilitasi Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**



d. Gambar III.4 KAJI CEPAT BENCANA



Dokumen Kaji Cepat Bencana adalah dokumen yang berisi hasil penilaian awal terhadap kejadian bencana yang meliputi jenis bencana, lokasi terdampak, tingkat kerusakan, jumlah korban, kebutuhan mendesak, serta kapasitas penanganan yang tersedia, yang disusun dalam waktu cepat sebagai dasar pengambilan keputusan pada tahap tanggap darurat.

e. Gambar III.5 PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Padu hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertepatan dengan Hari:

- Nama : Dts. NOVIAH RAHMAD, M.Si
NIP : 19701116 199003 1 001
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD DIY
Alamat : JL. KENARI NO. 14.A, YOGYAKARTA
Telepon : (0274) 555588
- Nama : ACHMAD SYAMIL MOOOWWIE
NIK : 340101002090001
Jabatan : STAFF LOGISTIK
Instansi : BPBD KAB. KULON PROGO
Telepon : 08559482117

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan barang sesuai dengan list dalam tabel di bawah ini kepada PIHAK KEDUA, sebagai bantuan dalam rangka penanganan bencana di DIY.

No	Kode Barang	Nama Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah Harga
1.	10010181	APRO 2024 Angkutan	10 Unit	Rp740.000	Rp7.400.000
2.	10010150	APRO 2024 Cangkul	20 Buan	Rp195.000	Rp3.900.000
3.	10010154	APRO 2024 Samping	20 Buan	Rp113.000	Rp2.260.000
4.	10010159	APRO 2024 Paket	10 Paket	Rp298.000	Rp2.980.000
5.	100116	BNPB 2023 Terpal Biru	30 Lembar	Rp275.000	Rp8.250.000
6.	100102	BNPB 2024 Matras	30 Lembar	Rp140.000	Rp4.200.000
7.	100105	BNPB 2024 Selendang	60 Lembar	Rp125.000	Rp7.500.000
		Total			Rp41.286.000

Dengan ditandatangani berita acara ini, pengelolaan, penggunaan, dan pendistribusian barang selanjutnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

PIHAK KESATU
ACHMAD SYAMIL MOOOWWIE

PIHAK KEDUA
Dts. NOVIAH RAHMAD, M.Si

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Padu hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertepatan dengan Hari:

- Nama : Dts. NOVIAH RAHMAD, M.Si
NIP : 19701116 199003 1 001
Jabatan : KEPALA PELAKSANA BPBD DIY
Alamat : JL. KENARI NO. 14.A, YOGYAKARTA
Telepon : (0274) 555588
- Nama : ACHMAD SYAMIL MOOOWWIE
NIK : 340101002090001
Jabatan : STAFF LOGISTIK
Instansi : BPBD KAB. KULON PROGO
Telepon : 08559482117

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan barang sesuai dengan list dalam tabel di bawah ini kepada PIHAK KEDUA, sebagai bantuan dalam rangka penanganan bencana di DIY.

No	Kode Barang	Nama Barang	Volume	Harga (Rp)	Jumlah Harga
1.	10010181	APRO 2024 Angkutan	10 Unit	Rp740.000	Rp7.400.000
2.	10010150	APRO 2024 Cangkul	20 Buan	Rp195.000	Rp3.900.000
3.	10010154	APRO 2024 Samping	20 Buan	Rp113.000	Rp2.260.000
4.	10010159	APRO 2024 Paket	10 Paket	Rp298.000	Rp2.980.000
5.	100116	BNPB 2023 Terpal Biru	30 Lembar	Rp275.000	Rp8.250.000
6.	100102	BNPB 2024 Matras	30 Lembar	Rp140.000	Rp4.200.000
7.	100105	BNPB 2024 Selendang	60 Lembar	Rp125.000	Rp7.500.000
		Total			Rp41.286.000

Dengan ditandatangani berita acara ini, pengelolaan, penggunaan, dan pendistribusian barang selanjutnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

PIHAK KESATU
ACHMAD SYAMIL MOOOWWIE

PIHAK KEDUA
Dts. NOVIAH RAHMAD, M.Si

f. Gambar III.6 PENYALURAN LOGISTIK PENANGANAN BENCANA

LAPORAN
SIAGA DARURAT
HIDROMETEOROLOGI
PERIODE 24 OKTOBER 2024 – 8 MEI 2025

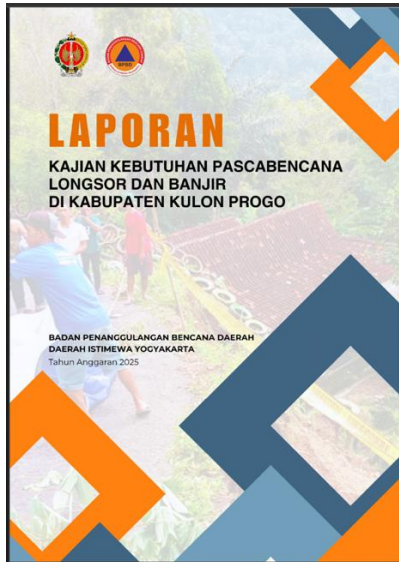


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025



Gambar 3. 38 Lokasi Kejadian Talud Longsor di Kelurahan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta Bulan Januari 2025

g. Gambar III.7 Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Longsor Dan Banjir

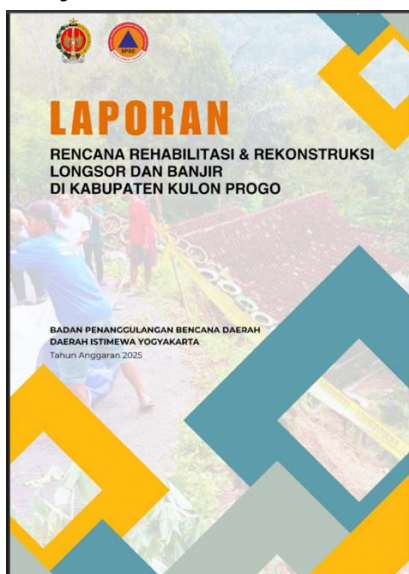


Gambar 2. 1 Kerusakan Infrastruktur Ruas Jalan
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2025.



Gambar 2. 2 Kerusakan Infrastruktur Jembatan
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon Progo, 2025.

h. Gambar III.8 Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Longsor Dan Banjir



Tabel 3. 3 Perkiraan Kebutuhan PascaBencana

No	Sektor / Sub Sektor	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran Kebutuhan					Perkiraan Kebutuhan	Kab/Kota	Provinsi	Pusat	Masyarakat	Dua Usaha Swasta	Ket.	
			RB	RS	RR	Lainnya	Satuan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
II	Infrastruktur														
2	Transportasi														
1	Ruas Jalan Pringtali - Jarakan														
	Pembangunan tembok penahan (talud) dan pembangunan kembali ruas jalan	Samigaluh	800				m2	5,600,000	4,480,000,000	4,480,000,000					
2	Ruas Jalan Taman - Gunung Kucir														
	Pembangunan tembok penahan (talud) dan pembangunan kembali ruas jalan	Samigaluh	120				m2	5,600,000	672,000,000	672,000,000					
3	Ruas Jalan Purvosari														

3. Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Gambar III.9 Rapat Koordinasi Damkarmat Kabupaten/ Kota Se-DIY



Notulen

Acara : Rapat Koordinasi Damkarmat Kabupaten/ Kota Se-DIY
 Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025
 Waktu : 09.00 WIB – 11.30 WIB
 Pembicara : Edhy Hartana, M.M.
 Tempat : Ruang Rapat D Lt 2 BPBD DIY
 Susunan Acara : 1. Registrasi Peserta
 2. Pembukaan
 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 4. Menyanyikan Lagu Mars Pemadam Kebakaran
 5. Sambutan Kepala Pelaksana BPBD DIY sekaligus membuka agenda
 6. Diskusi dan Tanya Jawab
 7. Penutupan

1. Sambutan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD DIY (Bapak Edhy Hartana, M.M) :

Menindaklanjuti hasil dari Rapat Koordinasi Damkarmat se-DIY pada tanggal 26 agustus 2025 yang lalu, bahwa saat ini pun peran damkar sudah dikenal masyarakat meskipun dukungan anggaran masih minimal. Diklat pemadam 1 (Fire Fighter 1) tidak bisa dilaksanakan karena ada refocusing anggaran, begitu pula dengan sarana fasilitas HT agar terhubung dalam satu frekuensi yang ternyata membutuhkan anggaran. Maka dari perubahan anggaran di agendakan, hal tersebut akan kita usulkan supaya bisa mendapatkan anggaran. Kemudian, terkait masih terkait dengan anggaran juga ke depannya kita akan usahakan terlaksananya audiensi dengan DPRD DIY terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana bagi damkarmat, hal tersebut juga dilakukan supaya di kemudian hari tidak lagi dilakukan pemangsaan anggaran terkait kegiatan-kegiatan damkar.

2. Sesi Diskusi

Moderator (Bapak Mahjudi)

Komponen yang menjadi materi pembahasan:

- Pemangku Damkarmat Kabupaten/Kota se-DIY bermaksud melakukan audiensi dengan Gubernur DIY;
- Perlu nya sebuah frekuensi radio bersama khusus penanggulangan kebakaran bagi Damkarmat Kabupaten/Kota se-DIY yang difasilitasi oleh Pemangku Damkarmat DIY (Provinsi);

b. Gambar III.10 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Dan MKKG



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta 55166, Telepon (0274) 555836, Faksimile (0274) 554206
 Pos-el bpbd@jogjapro.go.id, Laman bpbd@jogjapro.go.id

BERITA ACARA PENGECEKAN KAPASITAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siyanto
 NIP : 19710904 202421 1 001
 Jabatan : Pemadam Kebakaran Pemula
 Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan menyatakan bahwa telah melakukan pengecekan (assessment) terhadap kapasitas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) baik kapasitas struktural berupa keberadaan sarana-prasarana maupun kapasitas non struktural/kultural berupa potensi Sumber Daya Manusia (SDM), melalui pengumpulan informasi terkait Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Tim dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), kondisi system proteksi kebakaran dan sebagainya yang berada pada Satuan Kerja Perangkat daerah berikut :

Nama Instansi : Stasiun Televisi Republik Indonesia Yogyakarta
 Alamat : Jl. Magelang No km 4,5, Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
 Fungsi : Bangunan Perkantoran

Adapun informasi dan temuan menjadi rekomendasi perbaikan dan peningkatan dalam rangka kesiapan kedaruratan kebakaran dan penyelamatan pada instansi tersebut dengan sajian data sbb. :

4. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- a. **Gambar III.11 Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) bagi Abdi Dalem Karaton Yogyakarta**



Faktor Pendukung keberhasilan

- Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
- Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Pemerintahan Satriya.
- Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat keberhasilan :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya :
 - Jumlah personel yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah rawan bencana.
 - Kompetensi teknis penanggulangan bencana yang belum merata.
 - Kurangnya pelatihan dan sertifikasi kebencanaan secara berkelanjutan.
- Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal
 Penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak seperti OPD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Hambatan yang sering terjadi:
 - Koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi dengan baik.
 - Perbedaan persepsi mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
 - Kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif saat kondisi darurat.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana
 Fasilitas dan peralatan kebencanaan sangat penting untuk mendukung operasional. Beberapa hambatan antara lain:
 - Peralatan penanggulangan bencana yang terbatas atau sudah tidak optimal.

- Kurangnya teknologi pendukung seperti sistem peringatan dini.
- Infrastruktur logistik dan gudang penyimpanan yang belum memadai.

Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
1	Regulasi, kelembagaan, dan perencanaan	Masih perlu penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/kelembagaan mekanisme, penguatan kelembagaan dan penguatan kebijakan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.	Penerbitan peraturan, pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta kerjasama kemitraan tertunda	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak terkait pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.
2	Sistem informasi dan peringatan bencana	Belum tersusun dengan baik pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiap-siagaan berkoordinasi dengan pusat data, informasi dan humas.	Informasi kebencanaan dan sistem mitigasi kebencanaan belum terstruktur dengan baik	Menyiapkan petugas dan instruktur cadangan apabila pada saat bersamaan terjadi bencana yang harus direspon.
3	Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana	Perlu peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada kerentanan, keterpaparan, kapasitas bahaya dan lingkungan.	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan aman bencana (SPAB) melalui team peneliti melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan guru serta pihak sekolah.
4	Upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana	Masih diperlukan penataan kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan yang terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana, salah satunya melalui kerjasama lintas sektor di DIY.

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
		pencapaiannya secara terencana dan terukur.		
5	Upaya kesiap-siagaan daerah untuk penanggulangan bencana	Perlu peningkatan investasi PRB untuk katangguhan/resilensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.	Investasi PRB baik publik maupun swasta terkait penanggulangan dan kesiap-siagaan bencana masih rendah	Integrasi PRB ke dalam kurikulum pendidikan formal.

1.1.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY diukur dengan Indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun-n	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan: 1. Reformasi Birokrasi General Daerah; 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.

Sumber data diolah dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 38 (tiga puluh delapan) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *Leading Sector*/Koordinator Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 4 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
I. Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincih dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincih dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
II. Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	3 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	1 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	87,14	8,77	95,90	A	Memuaskan	86,95	8,92	95,87	0,03
2	Biro Hukum Setda DIY	84,08	6,83	90,91	A	Memuaskan	84,28	5,85	90,13	0,78
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,61	10,10	96,71	A	Memuaskan	87,57	9,06	96,63	0,08
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	86,15	5,73	91,88	A	Memuaskan	83,26	5,18	88,44	3,45
5	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY	85,41	12,67	98,08	A	Memuaskan	83,51	10,23	93,74	4,33
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	84,31	7,65	91,96	A	Memuaskan	86,60	6,88	93,48	- 1,52
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	82,23	11,05	93,28	A	Memuaskan	83,78	8,29	92,07	1,21
8	Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda DIY	85,25	7,39	92,64	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Paniradya Kaistimewan	85,47	10,99	96,46	A	Memuaskan	84,31	9,68	93,99	2,46
10	Sekretariat DPRD DIY	83,78	5,96	89,74	A	Memuaskan	83,65	5,11	88,76	0,98
11	Inspektorat DIY	88,75	9,42	98,17	A	Memuaskan	89,25	6,99	96,24	1,93
12	Dinas Pariwisata DIY	86,27	9,75	96,02	A	Memuaskan	84,64	8,51	93,15	2,87
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	87,94	13,06	101,00	AA	Sangat Memuaskan	86,95	12,05	99,00	2,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	82,98	14,46	97,44	A	Memuaskan	84,07	11,40	95,47	1,98
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	84,21	15,70	99,91	A	Memuaskan	85,45	12,00	97,45	2,46

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	85,92	12,81	98,73	A	Memuaskan	84,94	7,61	92,55	6,18
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,41	16,34	99,75	A	Memuaskan	85,22	11,94	97,16	2,59
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	85,16	11,41	96,57	A	Memuaskan	85,47	8,46	93,93	2,64
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	83,02	15,81	98,83	A	Memuaskan	83,49	12,39	95,88	2,95
20	Dinas Perhubungan DIY	83,96	12,24	96,20	A	Memuaskan	82,98	7,19	90,17	6,02
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	84,63	11,69	96,32	A	Memuaskan	83,26	7,38	90,64	5,68
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	87,15	13,27	100,42	AA	Sangat Memuaskan	86,94	12,54	99,48	0,94
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	85,06	11,44	96,50	A	Memuaskan	85,06	7,55	92,61	3,89
24	Dinas Kesehatan DIY	85,44	15,09	100,53	AA	Sangat Memuaskan	87,83	9,64	97,47	3,07
25	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	85,45	13,73	99,18	A	Memuaskan	82,52	9,94	92,46	6,73
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	88,32	10,42	98,74	A	Memuaskan	89,36	6,94	96,30	2,44
27	Dinas Sosial DIY	86,90	13,56	100,46	AA	Sangat Memuaskan	86,52	8,74	95,26	5,20
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	83,00	10,32	93,32	A	Memuaskan	82,61	6,29	88,90	4,42
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	85,77	12,01	97,78	A	Memuaskan	85,13	9,11	94,24	3,54

No	Unit Kerja	Nilai Total RB General 2025	Nilai Total RB Tematik 2025	INDEKS RB 2025	Kategori	Predikat	Nilai Total RB General 2024	Nilai Total RB Tematik 2024	INDEKS RB 2024	GAP
	Pengendalian Penduduk DIY									
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY	83,08	12,03	95,11	A	Memuaskan	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,37	8,76	90,13	A	Memuaskan	80,52	4,55	85,07	5,07
32	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY	86,64	12,86	99,50	A	Memuaskan	88,83	10,25	99,08	0,42
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	85,79	9,72	95,50	A	Memuaskan	87,67	7,22	94,89	0,61
34	Badan Kepegawaian Daerah DIY	88,12	9,46	97,58	A	Memuaskan	89,65	7,04	96,69	0,89
35	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	86,37	10,48	96,85	A	Memuaskan	88,09	8,04	96,13	0,72
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	85,46	8,51	93,97	A	Memuaskan	85,71	5,65	91,36	2,61
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,00	7,97	89,96	A	Memuaskan	80,83	6,33	87,16	2,80
38	Badan Penghubung Daerah DIY	81,41	7,82	89,23	A	Memuaskan	84,30	4,13	88,43	0,80
Rata-Rata		85,11	10,98	96,09			85,31	8,31	93,62	2,47

Sumber data: Biro Organisasi Setda DIY Januari 2026

Tabel III. 6 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 berdasar PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteri a	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuask an	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber data: PERMENPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Periode* /Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027*(%)
		Target*	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator :</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n <u>Penjelasan detail dari Meta Indikator:</u> Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah	A (87,16)	A (87,26)*	A (89,96) (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025)	103,09% (89,96/87,26 x100%)	A (90)*	99,95% (89,96/90 x 100%)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- d. Berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mendapatkan nilai skor Indeks RB Perangkat daerah (89,96) dengan Kategori A (Memuaskan);
- e. Target tahun 2025 (87,26) realisasi (89,96), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar (103,09%) (terlampaui);
- f. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar (87,16), terdapat kenaikan sebesar (2,8).
- g. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 (90).

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,02	91	
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1.1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
	2.1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	3.1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	110 Orang	110 Orang	100 %
	4.2. Pelaksana	12	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	an Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			
	4.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	4.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %
	5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	5.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
	6.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	6.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
	7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	Umum Kantor				
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %
	8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100 %
	8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 Unit	70 Unit	70 Unit	100 %
	8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100 %
	Total Anggaran Pendukung	13.266.154.928			

Capaian tersebut didukung dari:

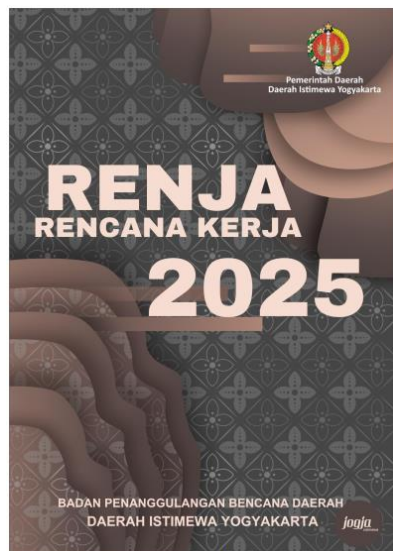
Capaian Program 1 terdiri dari 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Capaian Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Gambar III.12 Penyusunan Dokumen LKjIP 2024



2. Gambar III.13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



3. Gambar III.14 Penyusunan Dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah 2022-2027



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Minat dan penawaran mitra atau stakeholder dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di BPBD DIY;
- b. Masyarakat banyak membutuhkan informasi terkait kegiatan dalam penanggulangan bencana;
- c. Merupakan kegiatan wajib mengikat yang harus dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD DIY;
- d. SDM koordinatif dan kompeten;
- e. Sarana dan prasarana pendukung.

Faktor Penghambat keberhasilan :

- a. Alokasi anggaran menjadi kendala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan diantaranya :
 - Sebagian kegiatan masih bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat atau bantuan lainnya.
 - Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sistem informasi.
 - Keterbatasan alokasi anggaran untuk penguatan tata kelola dan inovasi pelayanan.
 - Prioritas anggaran lebih difokuskan pada kegiatan operasional utama.

b. Sistem Informasi dan Pengelolaan Data, antara lain :

- Sistem informasi kebencanaan belum sepenuhnya terintegrasi.
- Keterbatasan pemutakhiran data secara berkala.
- Kapasitas pengelolaan data dan teknologi informasi yang masih terbatas.

Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
1	Regulasi, kelembagaan, dan perencanaan	Masih perlu penguatan tata kelola risiko untuk mendorong kerjasama kemitraan, perbaikan/kelembagaan mekanisme, penguatan kelembagaan dan penguatan kebijakan pada pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.	Penerbitan peraturan, pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta kerjasama kemitraan tertunda	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak terkait pengurangan risiko bencana dan pengelolaan sumberdaya.
2	Sistem informasi dan peringatan bencana	Belum tersusun dengan baik pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiap-siagaan berkoordinasi dengan pusat data, informasi dan humas.	Informasi kebencanaan dan sistem mitigasi kebencanaan belum terstruktur dengan baik	Menyiapkan petugas dan instruktur cadangan apabila pada saat bersamaan terjadi bencana yang harus direspon.
3	Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana	Perlu peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat akan risiko bencana dengan penguatan kebijakan dan implementasi didasarkan pada kerentanan, keterpaparan, kapasitas bahaya dan lingkungan.	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas satuan pendidikan aman bencana (SPAB) melalui team peneliti melakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan guru serta pihak sekolah.
4	Upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana	Masih diperlukan penataan kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan	Masih lambatnya penelitian dan pengembangan pendidikan terkait kebencanaan	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan yang terintegrasi untuk mengurangi risiko bencana, salah satunya melalui kerjasama lintas sektor di DIY.

No.	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian
		berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur.		
5	Upaya kesiap-siagaan daerah untuk penanggulangan bencana	Perlu peningkatan investasi PRB untuk ketangguhan/resilensi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta dalam mitigasi struktural dan non struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.	Investasi PRB baik publik maupun swasta terkait penanggulangan dan kesiap-siagaan bencana masih rendah	Integrasi PRB ke dalam kurikulum pendidikan formal.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

- a. Capaian kinerja lainnya yang diampu oleh Perangkat Daerah, mengacu pada RPJPN, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Di samping itu RIPB Tahun 2020-2044 juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- b. **RENBINWAS SPM SUB URUSAN TRANTIBUMLINMAS DI PEMDA DIY**

Pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan tema “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” menempatkan pelayanan dasar sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam RPJMN 2025–2029, Asta Cita dijabarkan melalui sembilan program prioritas nasional adalah penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

Isu strategis SPM Trantibumlinmas terbagi dalam 3 sub urusan yaitu Trantibumlinmas, kebakaran dan bencana. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 2024-2027. Melalui Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Koordinator yang menangani SPM, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka renbinwas yang dilakukan setiap bulan melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dalam memonitoring pengisian dalam aplikasi Bangda SPM yang kami lakukan secara luring agar dalam setiap triwulan dapat terpantau terus dan untuk urusan sub kebakaran juga kami lakukan demikian meskipun unit kebakaran di Kabupaten Sleman tidak ditangani oleh BPBD Kabupaten Sleman, namun dibawah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan isu strategis SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana meliputi penyelenggaraan kebencanaan di daerah masih terfokus pada saat terjadinya bencana dan belum pada tahap kesiapsiagaan bencana; ketersediaan dan mutu sarana prasarana penyelamatan belum memadai; masih banyak BPBD yang belum memahami tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku; penentuan sasaran, target, kebutuhan anggaran dan capaian penerima layanan SPM yang bersifat kebencanaan/force majeure masih menjadi kendala di beberapa kabupaten/kota; pengumpulan data warga negara di wilayah rawan bencana, lokasi penegakan ketertiban umum, dan titik rawan kebakaran masih sulit dilakukan secara efektif; tidak semua daerah memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang merupakan elemen penting dalam manajemen bencana; dan belum bisa terlaksananya pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana disebabkan belum tersedianya dan belum diperbaharuinya dokumen kajian risiko bencana karena tidak adanya anggaran.

Rekomendasi Penerapan SPM Trantibumlinmas atas isu strategis diatas untuk Sub Urusan Bencana sebagai berikut: bimbingan teknis atau pendampingan penyusunan perencanaan kegiatan SPM Bencana yang dikaitkan dengan kebutuhan penganggaran daerah berdasarkan analisis risiko wilayah masing-masing; fasilitasi pembentukan dan penguatan “Pusdalops-PB” di seluruh daerah, khususnya kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi, serta penyediaan pelatihan manajemen informasi kebencanaan; mendorong ketersediaan dan kualitas dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana) dan PRB (Pengurangan Risiko Bencana); dan penyusunan formula perhitungan penerima layanan berbasis risiko dan pedoman teknis khusus untuk layanan bersifat force majeure.

Meskipun pelaksanaan SPM untuk OPD BPBD belum maksimal dikarenakan kegiatan SPM tidak ada cantolan kegiatan tersendiri sehingga harus dompleng ke sekretariat untuk melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota. Maksud dan tujuan ditetapkan Pergub Nomor 8 Tahun 2024 untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana Kab/Kota di DIY.

Dalam pergub tersebut diatur pula untuk membentuk tim koordinasi yang melibatkan pentahelix dengan didukung anggaran dari APBD. Adapun pekerjaan tim koordinasi mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik secara umum dan teknis. Secara Umum meliputi pembagian urusan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan, sedangkan secara teknis meliputi penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, respon darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Muatan laporan juga diatur di dalam pergub yang akan disampaikan kepada Gubernur triwulan sekali.

Namun dalam kenyataannya dari 2024 sampai sekarang untuk renbinwas belum kami lakukan secara maksimal, meskipun rapat koordinasi yang selama ini kami lakukan hanya secara luring, WhatshAap agar pengisian di aplikasi bangda dapat termonitor terus.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara normatif, pelaksanaan SPM Damkar didasarkan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran, Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 memiliki posisi strategis karena mengatur secara tegas bentuk kelembagaan yang menangani sub urusan kebakaran, termasuk penamaan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Regulasi ini menegaskan bahwa sub urusan kebakaran idealnya ditangani oleh dinas yang berdiri sendiri, bukan sekadar bidang atau seksi yang menempel pada OPD lain, agar fungsi perlindungan masyarakat dapat berjalan fokus, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan SPM Damkar masih menghadapi tantangan karena belum terbentuknya Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang mandiri di tingkat provinsi, sebagaimana juga tercantum dalam lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/9757/SJ Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 belum sepenuhnya optimal. Secara kelembagaan, penanganan sub urusan kebakaran masih berada dalam struktur OPD yang lebih besar, sehingga ruang gerak organisasi, penguatan sumber daya manusia, dan penganggaran menjadi terbatas.

Dari sisi sumber daya manusia, Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan harus didukung oleh personel yang memiliki kompetensi khusus dan jabatan fungsional yang relevan. Namun dalam praktik di DIY, jumlah personel pemadam kebakaran masih terbatas, belum seluruhnya mengisi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, serta belum merata mengikuti pendidikan dan pelatihan berjenjang. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam mencapai waktu tanggap lima belas menit dan kualitas layanan penyelamatan.

Secara operasional, keterbatasan sarana prasarana, yang belum tersedia, serta belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran di setiap kecamatan semakin memperlemah pencapaian SPM. Padahal Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 menekankan pentingnya organisasi pemadam kebakaran yang memiliki struktur jelas, unit kerja operasional yang memadai, serta dukungan logistik dan peralatan sesuai standar. Tanpa kelembagaan yang kuat sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut, pemenuhan SPM Damkar akan sulit dicapai secara berkelanjutan.

Dalam kerangka RPJMD 2025–2029, sinergi antara SPM Damkar dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menindaklanjuti regulasi ini dengan membentuk atau mendorong terbentuknya dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang mandiri, minimal bertipe C, serta memastikan tidak digabungkan kembali dengan OPD lain. Langkah ini akan memperjelas tugas pokok dan fungsi organisasi, memperkuat kewenangan penganggaran, serta memudahkan koordinasi lintas sektor.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia harus diselaraskan dengan struktur kelembagaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Penyusunan peta jalan pengembangan kompetensi dan jenjang karir petugas Damkar perlu mengacu pada kebutuhan organisasi yang mandiri, termasuk pemenuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Pendidikan dan pelatihan berjenjang harus diprogramkan secara sistematis agar setiap unit operasional memiliki personel yang kompeten.

Dari sisi kebijakan dan perencanaan, RISPKP provinsi dan kabupaten/kota harus disusun dan dimutakhirkan dengan mempertimbangkan struktur organisasi Damkar sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Dengan demikian, perencanaan kebutuhan sarana prasarana, penataan pos sektor, dan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran dapat dilakukan secara realistis dan terintegrasi dengan kapasitas kelembagaan yang ada.

Penguatan pendanaan juga harus mengikuti logika kelembagaan mandiri. Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berdiri sendiri akan lebih mudah memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM, baik melalui APBD, DAU Earmark SPM, DAK tematik, maupun skema hibah. Pendanaan multiyear diperlukan untuk modernisasi armada, pembangunan pos sektor, penyediaan hidran umum, serta pengadaan alat pelindung diri sesuai standar.

Dengan demikian, pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebakaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari implementasi Permendagri Nomor 16 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi fondasi kelembagaan yang memungkinkan SPM dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui penguatan organisasi pemadam kebakaran yang mandiri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan berbasis risiko, serta dukungan pendanaan yang memadai, DIY diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan penyelamatan, sekaligus berkontribusi pada pencapaian indeks SPM dan Indeks Trantibumlinmas menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini telah menunjukkan sejumlah capaian nyata, meskipun belum sepenuhnya mencapai standar ideal. Pencapaian tersebut dapat dilihat secara komprehensif melalui enam pilar Indeks Trantibumlinmas, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, serta logistik dan peralatan.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan sub urusan kebakaran di DIY sampai saat ini pada umumnya masih ditempatkan dalam bentuk bidang atau unit yang melekat pada perangkat daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanat Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mandiri belum sepenuhnya dilaksanakan. Demikian pula dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang optimalisasi tugas pemadam kebakaran yang menekankan perlunya penguatan kelembagaan agar sebanding dengan beban tugas pelayanan dasar. Penempatan Damkar hanya sebagai bidang menyebabkan keterbatasan kewenangan, ruang penganggaran, serta pengembangan sumber daya manusia, sehingga fungsi perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran belum dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.

Pada aspek sumber daya manusia, DIY telah memiliki petugas pemadam kebakaran yang secara rutin melaksanakan tugas operasional. Setiap kabupaten dan kota secara umum telah memiliki puluhan personel aktif, dan sebagian di antaranya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pemadam kebakaran. Beberapa personel juga telah mengisi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, walaupun jumlahnya masih terbatas. Dengan kondisi ini, indikator SPM terkait ketersediaan petugas dapat dikatakan telah terpenuhi pada level dasar, meskipun dari sisi jumlah ideal, kompetensi berjenjang, dan pemerataan antarwilayah masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek kebijakan, pemerintah daerah di DIY telah memiliki dasar hukum pelaksanaan urusan kebakaran melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang tugas perangkat daerah, penanggulangan kebakaran, serta koordinasi lintas sektor melalui Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja BPBD DIY yang mengatur Tugas Damkarmat Pemda DIY. Beberapa kabupaten dan kota juga telah mulai menyusun atau memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator SPM terkait ketersediaan kebijakan pendukung mulai terpenuhi, walaupun belum seluruh daerah memiliki dokumen perencanaan berbasis risiko yang mutakhir dan terintegrasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum sepenuhnya didukung oleh penganggaran yang optimal. Meskipun Pemerintah Daerah DIY telah mengalokasikan anggaran untuk operasional layanan pemadam kebakaran, alokasi tersebut pada umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus dirancang berbasis kebutuhan pemenuhan SPM. Akibatnya, beberapa kebutuhan strategis seperti penguatan kelembagaan, penambahan personel sesuai standar, peningkatan kompetensi berjenjang, serta modernisasi sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi secara menyeluruh. Keterbatasan penganggaran ini terlihat dari masih terbatasnya dukungan dana untuk pembangunan dan penguatan pos sektor, pengadaan armada baru, serta penyediaan alat pelindung diri sesuai standar. Selain itu, pendanaan untuk kegiatan pencegahan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat juga belum menjadi prioritas utama dalam struktur anggaran daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen fiskal terhadap pemenuhan SPM Damkar masih perlu diperkuat agar sejalan dengan tuntutan pelayanan dasar yang bersifat wajib dan menyentuh langsung keselamatan masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pemda DIY belum maksimal dalam menyediakan anggaran khusus berbasis SPM Sub Urusan Kebakaran. Penguatan kebijakan penganggaran yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting agar pelaksanaan SPM Damkar dapat mencapai kategori tuntas dan memberikan jaminan pelayanan dasar yang optimal kepada seluruh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam aspek logistik dan peralatan, ketersediaan sarana pendukung pemadam kebakaran di kabupaten dan kota di DIY masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan secara optimal. Sebagian besar daerah masih mengandalkan armada lama dengan jumlah terbatas, sementara peralatan penunjang seperti pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan penyelamatan belum tersedia secara lengkap dan sesuai standar terbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan logistik belum sepenuhnya siap untuk menjamin layanan yang cepat, aman, dan berkualitas, sehingga pemenuhan indikator SPM terkait sarana dan prasarana masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan serius melalui pengadaan, peremajaan, dan standarisasi peralatan.

Dalam konteks pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi bahaya kebakaran, simulasi evakuasi, serta pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan di sekolah, pasar, perkantoran, dan kawasan permukiman. Namun, pembentukan dan penguatan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) sebagai ujung tombak partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal. Jumlah Redkar masih terbatas, belum merata di seluruh wilayah, dan belum seluruhnya didukung dengan pembinaan, pelatihan rutin, serta sarana pendukung yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator SPM terkait pencegahan dan partisipasi masyarakat telah mulai dijalankan, tetapi masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan kelembagaan Redkar agar upaya pencegahan kebakaran dapat berlangsung lebih sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pencapaian SPM Damkar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan berada pada tahap “terpenuhi secara dasar namun belum optimal”. Seluruh konteks pencapaian SPM, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, hingga logistik dan peralatan, telah ada dan berjalan, namun masih memerlukan penguatan agar mencapai standar ideal. Kondisi ini menjadi pijakan penting bagi periode RPJMD 2025–2029 untuk mendorong peningkatan capaian SPM Damkar menuju kategori tuntas madya bahkan tuntas paripurna, sehingga layanan perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan penyelamatan dapat semakin andal dan merata menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran oleh Pemerintah Daerah DIY terhadap Kabupaten/Kota”

Dalam kerangka otonomi daerah yang berjenjang, Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kabupaten dan kota mampu memenuhi hak dasar warga negara atas perlindungan dari risiko kebakaran dan layanan penyelamatan secara merata dan berkeadilan.

Secara normatif, kewenangan pengawasan provinsi terhadap kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan fungsi pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketentuan ini diperkuat dengan peraturan perundang-undangan terkait SPM yang menempatkan pemerintah provinsi sebagai simpul koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian capaian SPM lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengawasan SPM Damkar oleh Pemerintah Provinsi DIY dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator SPM kabupaten/kota, baik secara administratif melalui pelaporan SPM maupun secara faktual melalui kunjungan lapangan dan verifikasi data. Monitoring ini mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, serta logistik dan peralatan sebagaimana tercermin dalam pilar Indeks Trantibumlinmas.

Pemerintah provinsi juga melaksanakan pembinaan teknis melalui asistensi penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Penerapan SPM, Rencana Aksi Daerah SPM, serta Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam proses ini, provinsi berperan memastikan bahwa perencanaan kabupaten/kota selaras dengan standar teknis, berbasis risiko kebakaran, dan realistis terhadap kapasitas kelembagaan masing-masing daerah.

Pengawasan juga dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani sub urusan kebakaran. Evaluasi ini tidak hanya menilai output kegiatan, tetapi juga outcome pelayanan, seperti keterjangkauan layanan, waktu tanggap, kualitas penyelamatan, serta kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan yang bersifat teknis maupun kelembagaan.

Dalam konteks penguatan kapasitas, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi aparatur Damkar kabupaten/kota melalui beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta forum koordinasi regional. Namun, upaya ini masih belum berjalan secara maksimal, baik dari sisi frekuensi, cakupan peserta, maupun kesinambungan program. Masih banyak aparatur Damkar yang belum mengikuti pelatihan berjenjang dan belum seluruh jabatan fungsional terisi sesuai kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia berjalan lambat dan belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan pemenuhan SPM, sehingga peran provinsi dalam penguatan kapasitas masih perlu ditingkatkan agar lebih sistematis, terencana, dan berdampak nyata di lapangan. Pengawasan juga terintegrasi dengan mekanisme pengendalian pendanaan, khususnya melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SPM. Provinsi berperan mendorong kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran berbasis SPM, termasuk memanfaatkan skema DAU earmark, DAK tematik, dan bantuan keuangan provinsi. Dalam hal ditemukan daerah yang belum serius menganggarkan SPM, provinsi dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari fungsi pembinaan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan SPM Damkar oleh Pemerintah Provinsi DIY terhadap kabupaten/kota tidak bersifat represif, melainkan bersifat pembinaan dan fasilitasi. Pengawasan dijalankan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan, sehingga pelaksanaan SPM Damkar di seluruh kabupaten/kota di DIY bergerak menuju standar yang sama dan menjamin hak dasar masyarakat atas layanan perlindungan dari risiko kebakaran dan penyelamatan secara berkelanjutan.

c. Capaian Kinerja *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027 antara lain:
 - a. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, Subkegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi mendukung tujuan nomor 1 Tanpa Kemiskinan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, tujuan 1 TPB tanpa kemiskinan terkait dengan sasaran makro pembangunan dan 5 (lima) Prioritas Nasional. Selain pemberantasan kemiskinan, tujuan 1 juga mencakup penerapan perlindungan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan, arahan RPJMN 2020-2024 adalah pada tiga kebijakan utama, yaitu 1) penyelenggaraan, perlindungan sosial, 2) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, serta 3) pengembangan penghidupan berkelanjutan dengan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi. Tujuan 11 tentang 1) pengurangan risiko bencana dan penguatan ketangguhan daerah; 2) peremajaan dan optimalisasi Early Warning System; serta 3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana., Tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. Tujuan 13 TPB penanganan perubahan iklim terkait dengan prioritas nasional yang keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan 13 memiliki tiga target, yaitu 1) memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; 2) mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan; dan 3) meningkatkan pendidikan, kesadaran, dan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.
 - b. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim dan tujuan nomor 16 Kelembagaan yang Tangguh.
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana mendukung tujuan nomor 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur, dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.
 - 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mendukung tujuan nomor 9 tentang industri, inovasi dan infrastruktur, dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.
- c. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Subkegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendukung tujuan nomor 2 tentang tanpa kelaparan, dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.
 - 2) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana mendukung tujuan nomor 2 tentang tanpa kelaparan, tujuan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi layak, dan mendukung tujuan nomor 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim.
- d. Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, Subkegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi, mendukung tujuan nomor 1 tentang tanpa kemiskinan, tujuan nomor 2 tentang tanpa kelaparan, tujuan nomor 3 kehidupan sehat sejahtera, tujuan nomor 4 pendidikan berkualitas, tujuan nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi layak, tujuan nomor 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan nomor 9 infrastruktur, tujuan 11 tentang kota dan pemukiman yang layak, tujuan 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan penanganan pasca bencana.
- e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Subkegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran mendukung tujuan nomor 11 tentang kota

f. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya, Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya mendukung tujuan nomor 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan nomor 16 tentang kelembagaan yang tangguh dan tujuan nomor 17 kemitraan untuk mencapai tujuan ketahanan sosial budaya. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

d. Capaian kinerja Program Prioritas Pemda sebagaimana Kepgub 353/KEP/2021

[illegible]

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

- a. Kegiatan Pelatihan Teknis Penanganan Kebakaran bagi Abdi Dalem Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Kraton Yogyakarta
Capaian Fisik : 100%
Telah terlaksananya kegiatan pada: 10-13 & 17 November 2025
Lokasi: Kraton Yogyakarta
Peserta: 80 orang Abdi Dalem
Materi meliputi:
1. Dasar-dasar Kebakaran
 2. Sistem Proteksi Kebakaran Gedung: Pendekatan Aktif & Pasif
 3. Sistem Proteksi Kebakaran pada Cagar Budaya Kraton
 4. Praktik Penggunaan APAR
 5. Integrasi Sistem Komando
 6. Strategi & Taktik Pemadaman Kebakaran Gedung: Dari Pre-Plan hingga Operasi
 7. SOP Pemadam Kebakaran dengan Hidran, Selang, Formasi Regu
 8. Protokol Evakuasi, Pengamanan Aset, dan Keamanan
 9. Prosedur Standar Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat: RJP, Tatalaksana Luka Bakar, Keracunan Gas, dan Transportasi Korban Cidera
 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Komando dan Kendali: Integrasi Komunikasi, Alarm, Pelaporan Cepat, dan Keamanan
 11. Table Top Exercise Penanggulangan Kebakaran Kraton
 12. Simulasi Kebakaran dan Sistem Komando di Kraton Yogyakarta.
- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran, EWS, dan MKKG di sekitar Sumbu Filosofi
Capaian Fisik : 100%
Dokumen berupa surat rekomendasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring & evaluasi di sekitar Sumbu Filosofi meliputi :
1. Kawasan Pertokoan Malioboro
 2. Ramai Mall Malioboro
 3. Plaza Malioboro
 4. Novotel Suites Malioboro
 5. BPD DIY Digital Lounge Malioboro
 6. Malioboro Prime Hotel Yogyakarta
 7. Ramayana Mall Malioboro
 8. Pasar Brongharjo
 9. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
 10. Kantor Harian KR Mangkubumi
 11. PT Bank MAS KC Mangkubumi
 12. Bank BCA KC Mangkubumi
 13. Grand Zuri Hotel Mangkubumi
 14. Sentral Yamaha Mangkubumi
 15. Bank Permata Mangkubumi
 16. Hotel Arjuna Mangkubumi
 17. Hotel Herper Mangkubumi

18. The 101 Hotel Mangkubumi
19. Grand Senyum Hotel Jl Diponegoro Yogyakarta
20. Bank Raya KC Jl Diponegoro
21. Pasar Kranggan
22. Coffee & Eatery Kebon Ndalem - Tugu
23. Kantor Bumiputera Yogyakarta
24. Toko ATK Murah - Tugu
25. Bank Mandiri Jl Jend Sudirman 26 Yogyakarta
26. Kantor OJK Jl Jend Sudirman
27. The Phoenix Hotel Sudirman
28. Bank CIMB Niaga Syariah Jl Jend Sudirman 13 Yogyakarta

e. **Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda**

Sebagaimana amanat cascading Kinerja BPBD DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 11 Kontribusi Tujuan dan Sasaran BPBD DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	108,7	*) 88,91	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,3%	101,32%
					Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah	0,76	0,77

						(IKD) DIY		
					Meningkat nya Tata Kelola Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han di BPBD DIY	Kateg ori RB Peran gkat Daera h	A (87,26)	A (89,96)

Penjelasan (menjelaskan keterkaitan sasaran pada tahap capaian sasaran pemda):

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. BPBD DIY sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan penyiap bahan kebijakan Bidang Kelembagaan, Reformasi birokrasi, Ketatalaksanaan memiliki peran dalam membina Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam berkontribusi dengan cara :
 - a. Melaksanakan pembinaan penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis menuju Perangkat daerah yang agile dengan memperhatikan bentuk susunan Pemerintahan Asli
 - b. Melakukan pembinaan perbaikan Tatakelola Pemerintahan yang tergambar pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik sebagaimana tertera pada KepmenPAN RB Nomor 182 tahun 2025).
3. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, BPBD DIY juga diukur keberhasilan tatakelolanya melalui Sasaran Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan indikator Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY dan Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.

Tabel III. 12 Kontribusi Program BPBD DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Tinggi	Tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,02	91	104,57%
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,77	0,81	105,19%
						Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,70	100%
						Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,75	0,75	100%
						Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,77	0,66	85,7%
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota	97,6	99,43	101,875%
					PROGRAM	Skor Penanganan	0,82	0,95	115,85%

					PENYELE NGGARA AN KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KEBUDAY AAN	Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Penjelasan Kontribusi Program BPBD DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah :
 Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota
Meta Indikator :

Capaian SPM Bidang Damkar Kab/Kota Tahun 2025 :

1. Kulon Progo : 100%
2. Bantul : 100%
3. Sleman : 100%
4. Gunungkidul : 97,16%
5. Yogyakarta : 100%

Rata2 capaian : 99,43%

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id

Target BPBD Tahun 2025 : 97,6%

Realisasi : $99,43\%/97,6\% = 101,875\%$

Rerata Persentase Capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/ Kota telah tercapai melampaui target kinerja Tahun 2025 sebesar 99,43% . Dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi EWS, Sistem Proteksi Kebakaran serta MKKG di 20 lokasi meliputi, bangunan bangunan yang terletak di sepanjang Sumbu Filosofi, aset Pemda DIY, serta Perguruan Tinggi
2. Rapat Koordinasi Damkarmat Se- DIY di Sleman
3. Pembuatan Ranpergub Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
4. Sosialisasi dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran yang dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu SMA Negeri 1 Dlingo, MAN 4 Bantul, SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Kalasan, Biro Tata Pemerintahan DIY, serta SMA Negeri 2 Wates
5. Pelatihan Penanganan Kebakakaran Abdi Dalem MKKG Kraton yang dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang abdi dalem

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 13 Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,3%	101,32%	100,02%	18.982.338.665,00	16.319.483.297,00	85,97%	Rp 2.662.855.368,00
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,76	0,77	101,32%	3.026.056.110,00	2.921.333.526,00	96,53%	Rp 104.722.584,00
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan	Kategori RB Peringkat Daerah	A (87,26)	A (89,96)	103,09%	15.956.282.555,00	13.398.149.771,00	83,96%	Rp 2.558.132.784,00

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	h							

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPBD DIY Th 2025, Laporan Keuangan BPBD DIY Th 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Tujuan dan Sasaran BPBD DIY Tahun 2025 sudah tercapai melampaui target kinerja yaitu 100,02% dan 101,32% dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan sebesar Rp18.982.338.665,00 terealisasi Rp16.319.483.297,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.662.855.368,00 sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

3.4. Inovasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPBD DIY menggunakan aplikasi yang dipergunakan Pemda DIY untuk mendukung capaian kinerja serta pelayanan berupa aplikasi.

1. SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP merupakan suatu sistem manajemen kinerja yang diterapkan di seluruh instansi pemerintahan Indonesia, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara umum, SAKIP dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan tujuan utama meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan serta anggaran publik. Penerapan SAKIP dijalankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (results-oriented governance). Sistem ini tidak hanya menekankan adanya perencanaan dan pengukuran kinerja, tetapi juga bertujuan agar setiap program dan kegiatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Sengguh DIY

Aplikasi Sengguh DIY merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai instrumen pendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara elektronik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

3. E-Lapor DIY

E-Lapor DIY merupakan sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sistem ini menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Melalui E-Lapor DIY, masyarakat dapat menyampaikan berbagai bentuk pengaduan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Pengaduan yang masuk kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Dengan mekanisme ini, setiap laporan dapat dipantau progres penyelesaiannya sehingga menciptakan sistem yang lebih responsif dan terbuka.

4. Selain itu BPBD DIY juga menggunakan instrumen pendukung penerapan pengelolaan data dan informasi penanggulangan bencana berupa aplikasi InaWARE dan DIBI yang terintegrasi secara nasional serta aplikasi PAMOR yang dikelola oleh Pusdalops PB BPBD DIY. PAMOR merupakan singkatan dari Pusat Data Emergency Operation yaitu aplikasi berbasis web dan mobile yang digunakan oleh masyarakat, relawan, dan petugas untuk melaporkan serta memantau kejadian bencana secara real-time. Aplikasi PAMOR adalah aplikasi sistem informasi dan pelaporan kebencanaan yang dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) untuk membantu proses pelaporan, pengelolaan data, dan penanganan kejadian bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara cepat dan terintegrasi.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan relokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat bagi OPD dan Manfaat bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Dukungan Pelaksanaan Launching 55 SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di DIY	Badan Musyawarah Perbankan Daerah	Bantuan Peralatan berupa HT pada saat Launching SPAB		55 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diluncurkan	Alat Komunikasi yang dapat dipakai pada saat bencana
2	Informasi kondisi cuaca, gempa, dan iklim	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat
3	Informasi Perkembangan dan kondisi Gunung Merapi	BPPTKG	Update Informasi		Masyarakat	Bahan informasi yang disebarluaskan ke masyarakat

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY tahun 2025 dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan kinerja di BPBD DIY pada umumnya bersifat multidimensional, mencakup aspek SDM, anggaran, sarana prasarana, sistem kerja, hingga faktor eksternal masyarakat dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, peningkatan kinerja memerlukan pendekatan sistemik melalui:

- a. Penguatan kapasitas SDM,
- b. Modernisasi peralatan dan sistem informasi,
- c. Penguatan koordinasi lintas sektor,
- d. Perencanaan berbasis risiko,
- e. Serta peningkatan partisipasi dan literasi kebencanaan masyarakat.

2. Faktor kunci keberhasilan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam penanggulangan bencana, BPBD DIY dituntut mampu menjalankan fungsi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi secara efektif. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci berikut:

Optimalisasi Kinerja Silang Manajemen Lintas Sektor (Pentahelix)

Pendekatan Pentahelix menjadi kunci dalam penguatan sistem kebencanaan di DIY. Model ini melibatkan lima unsur utama:

◆ Pemerintah

Sebagai regulator, koordinator, dan pengambil kebijakan utama dalam manajemen bencana.

◆ Akademisi

Mendukung melalui kajian risiko, penelitian kebencanaan, dan pengembangan teknologi mitigasi.

◆ Dunia Usaha

Berkontribusi melalui CSR, dukungan logistik, serta pemulihan ekonomi pascabencana.

◆ Komunitas/Masyarakat

Sebagai subjek utama dalam kesiapsiagaan dan respons awal bencana.

◆ Media

Berperan dalam penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan edukatif.

Optimalisasi kinerja silang ini diantaranya dengan:

- Adanya forum koordinasi rutin.
- Mekanisme berbagi data dan informasi.
- Sistem komando yang jelas saat tanggap darurat.
- Kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Pendekatan Pentahelix memungkinkan:

- Penguatan mitigasi berbasis komunitas.
- Penyebaran informasi risiko yang lebih luas.
- Penanganan bencana yang lebih efektif dan efisien.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

1. Melakukan upaya-upaya pencegahan bencana;
2. Melakukan pengurangan risiko bencana di sektor-sektor utama pembangunan daerah;

3. Melakukan mitigasi bencana struktural dan non struktural;
4. Memastikan kesiapan sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. Melakukan kesiapsiagaan apabila terdapat potensi terjadinya bencana.
6. Mengembangkan sistem komando penanganan darurat bencana yang terstandarisasi;
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kejadian bencana;
8. Meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan darurat bencana;
9. Mengembangkan mekanisme pemulihan pascabencana yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana dan berkelanjutan.
10. Meningkatkan nilai indeks ketahanan daerah yang meliputi :
 - a. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan;
 - b. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana;
 - c. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana;
 - d. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko bencana;
 - e. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY			93,7%	100%	101,4%	101,3%	101,3%	101,2%	101,2%
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori RB Perangkat Daerah	BB > 70-80	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90	A > 80-90

Lampiran 2. Berita Acara Penyelarasan Kinerja



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

panungtungan

Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213, Telepon (0274) 562811, Faksimile (0274) 521818
Pos-el : roorganisasi@jogjaprov.go.id, Laman : biroorganisasi.jogjaprov.go.id

BERITA ACARA RAPAT PENYELARASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR B/00.163/1656/BK.6

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Ruang Rapat Radyo Suyoso Lantai 2 Bapperida DIY, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.
NIP : 198104062011012007
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Alamat : Biro Organisasi Setda DIY, Unit 5, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Biro Organisasi Setda DIY, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II Nama : Andreas Avelinus Suwantoro, S.Psi., M.Si.
NIP : 196911101999031010
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan
Alamat : Bapperida DIY, Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala BAPPERIDA DIY selanjutnya disebut Pihak Kedua.

III Nama : Bonaventura Ega Adi Pradana, S.Tr.I.P.
NIP : 200107302024091001
Jabatan : Analis Kebakaran Pertama
Alamat : BPBD DIY, Jalan Kenari No. 14A, Semaki, Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Sesuai ...

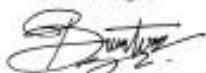
Sesuai dengan hasil pembahasan penyalarsan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyepakati penyalarsan kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini,
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari Kamis tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pihak Ketiga,



Bonaventura Ega Adi
Pradana, S.Tr.I.P.

Pihak Kedua,



Andreas Avelinus
Suwanto, S.Psi., M.Si.

Pihak Pertama,



Fajar Rahmawati, S.Sos.,
M.P.A.



Ana Windyawati, S.H., M.H.

Lampiran Berita Acara
Nomor: 0/00.843/1654/BR.6

Lampiran I.a. Penyesuaian Indikator Kinerja Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2025-2027

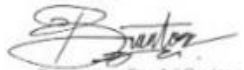
No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelasan	Target	Penyelasan	Target	Penyelasan	
1	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian prioritas 5 dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	101,4%	101,4%	101,3 %	100%	101,3 %	100%	101,2%	100%	Pada perhitungan Tujuan BPBD DIY terdapat komponen masing-masing prioritas yang sebenarnya naik seperti yang tertera dalam tabel di atas. Penetapan target tujuan yang terlihat turun setiap tahun menyesuaikan proyeksi perhitungan kenaikan masing-masing prioritas. Berdasarkan desk, BPBD DIY disarankan untuk mengubah Target Tujuan tahun 2025 dan tahun berikutnya seperti realisasi tahun 2024, BPBD DIY kesulitan

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelasan	Target	Penyelasan	Target	Penyelasan	
											untuk mencapai target tersebut. Apabila tren Target Tujuan BPBD DIY mengganggu karena terlihat menurun, BPBD DIY menyarankan untuk mengubah Target Tujuan menjadi 100% setiap tahunnya

Lampiran II.c. Penyeragaman Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Program Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Pihak Ketiga,


Bonaventura Ega Adi Pradana,
S.Tr.I.P

Pihak Kedua,


Andress Avelinus Suwaritono,
S.Psi., M.S.L.

Pihak Pertama,


Fajar Rahmawati, S.Sos., M.P.A.


Mengetahui
Kepala Biro Organisasi,

Ana Windyawati, S.H., M.H.

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i> Alamat: Jalan Kenari No. 14 A, Yogyakarta, Kode Pos – 55166 Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554206, Pos-el: bpbdi@jogjaprov.go.id, Laman: bpbdi.jogjaprov.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Drs. Noviar Rahmad, M.Si.
Jabatan	: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama	: Hamengku Buwono X
Jabatan	: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.	
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Yogyakarta, 30 Januari 2025	
Pihak Kedua Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,   Hamengku Buwono X	Pihak Pertama Kepala Pelaksana BPBD,   Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Angka	101,3	Triwulan I	101,3
					Triwulan II	101,3
					Triwulan III	101,3
					Triwulan IV	101,3*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Perjanjian

PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,76	Triwulan I	0,76
					Triwulan II	0,76
					Triwulan III	0,76
					Triwulan IV	0,76*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (87,16)	Triwulan I	A (87,16)
					Triwulan II	A (87,16)
					Triwulan III	A (87,16)
					Triwulan IV	A (87,16*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,76	Triwulan I	0,76
					Triwulan II	0,76
					Triwulan III	0,76
					Triwulan IV	0,76*)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A (87,16)	Triwulan I	A (87,16)
					Triwulan II	A (87,16)
					Triwulan III	A (87,16)
					Triwulan IV	A (87,16*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp17.223.543.674,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp2.647.017.250,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (APBD)	Rp52.243.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp700.000.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp20.622.803.924,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program (-) Kegiatan (-) Sub Kegiatan (-) Rp. 0
4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk (-) Rp. 0

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

 Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
 Kepala Pelaksana BPBD,

 Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alamat: Jalan Kenari No. 14 A, Yogyakarta, Kode Pos – 55166 Telp (0274) 555836,
Fax (0274) 554206, Pos-el: bpbd@yogjaprov.go.id, Laman: bpbd.yogjaprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya pergantian/mutasi pejabat dan/atau penetapan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

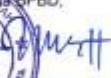
Yogyakarta, 26 November 2025

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,



Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana BPBD,



Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	Angka	101,3	Triwulan I	101,3
					Triwulan II	101,3
					Triwulan III	101,3
					Triwulan IV	101,3**

Keterangan :

*Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja

** Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian ...

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
 Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan*	Triwulan	Target**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	Angka	0,76*	Triwulan I	0,76
					Triwulan II	0,76
					Triwulan III	0,76
					Triwulan IV	0,76**
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (87,26)*	Triwulan I	A (87,26)
					Triwulan II	A (87,26)
					Triwulan III	A (87,26)
					Triwulan IV	A (87,26)**

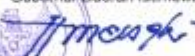
Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp15.956.282.555,00
2.	Program Penanggulangan Bencana (APBD)	Rp 2.518.867.410,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (APBD)	Rp 37.743.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (DAIS)	Rp 469.445.700,00
	Jumlah Anggaran	Rp18.982.338.665,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program (-) Kegiatan (-) Sub Kegiatan (-) Rp. 0
4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga untuk (-) Rp. 0
5. Anggaran disesuaikan dengan Perubahan APBD bulan November 2025

Yogyakarta, 28 November 2025


 Pihak Kedua
 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

 Hamengku Buwono X


 Pihak Pertama
 Kepala Pelaksana RPD,

 Agusdinus Roudhotul Haryata, S.H., S.T., M.Kes.

Lampiran 4. Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

ꦲꦶꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦏꦸꦤ꧀ꦠꦶꦭꦶꦠ

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512587 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman <https://inspektorat.jogjaprov.go.id>

20 Maret 2025

Nomor : 12 / 700.1-2-1 / 447 / 185
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY Tahun 2024

Yth. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DIY Tahun 2024, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

e. Keputusan ...

- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 057/III/INSP/2025 Tanggal 03 Maret 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi penguatan pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Melalui Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Sasaran...

5. Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Badan;
- b. perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- c. penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah;
- e. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan kebakaran serta prosedur tetap penanganan bencana dan kebakaran;
- f. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
- g. pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
- h. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
- i. penyusunan rekomendasi tingkatan dan status bencana;
- j. pengembangan kerjasama dengan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. pembinaan reformasi birokrasi Badan;
- l. penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;

m. pengembangan ...

- m. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- o. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran kabupaten/kota;
- p. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- r. pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Subbidang Pencegahan;
- d. Bidang Penanganan Darurat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. Bidang Logistik dan Peralatan;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;

d. Pada ...

- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menggunakan Aplikasi SENGGUH dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Terhadap kinerja kegiatan telah menunjukkan adanya perbaikan kualitas pada Log Frame, KAK, ROPK dengan keterisian 100%, lebih rinci dan terjadwal;
- b. Catatan hasil monev terkait kinerja OPD telah ditindaklanjuti dengan kolaborasi berupa pelibatan lintas sektor dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran OPD maupun pencapaian target program;
- c. Catatan terhadap pelaksanaan Dana Keistimewaan telah ditindaklanjuti dengan capaian fisik 100% dengan deviasi kurang 5%;
- d. Tindak lanjut atas hasil monev PBJ berupa RUP 100 %, SPSE 100%;
- e. Catatan hasil monev atas keterisian aplikasi Jogja Dataku sudah ditindaklanjuti dengan capaian Dataku 100%;
- f. Melakukan penghematan terhadap pemakaian listrik, air dan telepon;
- g. Perencanaan yang dilakukan berdasarkan skala prioritas;
- h. Mengatur kegiatan sesuai dengan angka yang telah disusun;
- i. Perbaikan dalam pola penataan keuangan instansi.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 84,44. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,82 atau 86,08% dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,36 atau 84,55% dari bobot sebesar 30%;

c. Evaluasi : 

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,75 atau 85,00% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,50 atau 82,00% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal guna memastikan bahwa Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.
- b. Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi dengan melakukan peningkatan dan evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada pencapaian kinerja, Pelaporan Kinerja dalam penyajian laporan kinerja yang menjadi tanggungjawab seluruh pegawai dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memperoleh nilai 84,44. Nilai tersebut masuk dalam kategori **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY diharapkan dapat mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat

membantu 

membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Inspektur

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Tembusan:

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alamat: Jalan Kenari No. 14a, Yogyakarta, Telp (0274) 555836, Fax (0274) 554220
Website: bpbd.jogjapro.go.id, Email: bpbd@jogjapro.go.id, Kode Pos: 55166

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Nomor : R / 700.1.2.1 / 487 / INS tanggal 20 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Tahun 2024. Dalam laporan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY agar melakukan tindak lanjut. Adapun tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP sebagai berikut :

No.	Saran / Rekomendasi LHE AKIP	Tindak Lanjut
1.	a) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal guna memastikan bahwa Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.	Monitoring Manajemen Kinerja : 1. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memperhatikan: - Identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU): Tentukan IKU yang relevan dengan tugas dan fungsi BPBD DIY, misalnya: jumlah kejadian bencana yang ditangani, jumlah korban yang diselamatkan, efektivitas penyaluran bantuan, dll. - Pengumpulan Data: Lakukan pengumpulan data secara rutin dan akurat terkait pencapaian IKU. - Analisis Data: Analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan potensi perbaikan. 2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP): - Evaluasi Sistematis: Lakukan evaluasi AKIP secara sistematis dan terstruktur, melibatkan tim internal yang kompeten.

		• Identifikasi Permasalahan: Identifikasi permasalahan yang ditemukan selama evaluasi, misalnya: hambatan dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya, dll. • Pemberian Nilai dan Atribut: Berikan nilai dan atribut yang relevan terhadap kinerja BPBD DIY berdasarkan hasil evaluasi. • Pemberian Solusi: Tawarkan solusi atas permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.
	b) Melakukan manajemen kinerja dengan baik dan terdokumentasi dengan melakukan peningkatan dan evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada pencapaian kinerja, Pelaporan Kinerja dalam penyajian laporan kinerja yang menjadi tanggungjawab seluruh pegawai dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;	Tindak lanjut yang dilakukan dengan memperhatikan : • Manajemen Kinerja yang Baik dan Terdokumentasi: Penting untuk mengelola kinerja secara sistematis dan terstruktur, dengan dokumentasi yang memadai. • Peningkatan dan Evaluasi Pengukuran Kinerja: Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap cara pengukuran kinerja, memastikan relevansi dan akurasi indikator kinerja. • Pelaporan Kinerja: Menyajikan laporan kinerja yang akurat dan transparan, serta memastikan semua pegawai bertanggung jawab atas penyajian laporan tersebut. • Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti. • Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja: Tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja seluruh pegawai, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

		• Mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Yogyakarta: Seluruh kegiatan manajemen kinerja ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Yogyakarta.
	c) Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY	Untuk meningkatkan praktik baik budaya kinerja dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), langkah-langkah yang diambil: 1. Peningkatan Keterlibatan <i>Stakeholder</i>: • Kolaborasi yang lebih erat: Libatkan lebih banyak pihak dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Masyarakat, pejabat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memperbaiki sistem akuntabilitas. • Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat: Peningkatan keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan dan menjelaskan pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat melalui forum publik, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya. 2. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi • Peningkatan kapasitas pengawas: Pemerintah daerah dapat melibatkan lebih banyak lembaga pengawasan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja. • Meningkatkan transparansi data kinerja: Membuka lebih banyak informasi terkait kinerja anggaran dan program.

		3. Penerapan Sistem Pengukuran Kinerja yang Jelas • Indikator kinerja yang terukur: Menyusun indikator yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tujuan daerah serta memantau pencapaiannya secara berkala. • Sistem manajemen kinerja berbasis data: Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan kinerja secara real-time akan meningkatkan akuntabilitas. 4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah • Pelatihan dan pengembangan profesional: Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu ada pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait manajemen kinerja dan akuntabilitas. • Penghargaan bagi kinerja baik: Memberikan penghargaan kepada unit kerja atau pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik dapat mendorong budaya kerja yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas. 5. Mendorong Inovasi dan Kreativitas • Adopsi teknologi dan inovasi: Pemerintah daerah perlu memanfaatkan teknologi terbaru untuk mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Sistem aplikasi yang efisien dan sistem informasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik. • Mendorong budaya inovatif: Memberikan ruang bagi pegawai untuk memberikan ide-ide baru yang dapat meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Inovasi dapat berupa kebijakan, sistem, atau
--	--	--

prosedur yang lebih efisien dan transparan.

6. Evaluasi dan Umpan Balik Berkala

- Audit kinerja secara rutin: Lakukan audit kinerja secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah. Temuan dari audit ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem akuntabilitas.
- Sistem umpan balik yang efektif: Membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja pemerintah daerah melalui platform yang mudah diakses, seperti aplikasi atau website resmi.

7. Konsistensi dalam Penegakan Aturan

- Penegakan disiplin dan sanksi yang adil: Menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang tidak memenuhi standar kinerja akan membantu meningkatkan akuntabilitas. Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap tindakan pemerintah daerah.



Lampiran 5. Lain lain

Dokumen pendukung atas isian pada tabel II.2 (Dokumen Perubahan
RENSTRA Tahun 2022-2027)





PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA